

# STRATEGI PENGANGKATAN KAESANG SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2024

*by Galetcia Jusly*

---

**Submission date:** 05-Aug-2025 10:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2725490567

**File name:** Skripsi\_BAB\_1-5\_-\_Galetcia\_Jusly.docx (499.04K)

**Word count:** 19690

**Character count:** 131807

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi <sup>57</sup> pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dampaknya terhadap perolehan suara pada Pemilu 2024. Kaesang, figur publik sekaligus putra <sup>1</sup> Presiden Joko Widodo, diangkat <sup>35</sup> sebagai ketua umum hanya dua hari setelah resmi menjadi anggota PSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima narasumber yang terdiri dari pengamat politik, akademisi, dan internal partai PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Kaesang membawa dampak terhadap peningkatan visibilitas PSI di ruang publik dan media sosial, terutama di kalangan pemilih muda. Namun, strategi ini tidak secara signifikan mengangkat perolehan suara PSI hingga menembus ambang batas parlemen. Temuan juga menunjukkan bahwa meskipun Kaesang memiliki modal simbolik, sosial, ekonomi, dan moral, strategi ini dinilai terlalu simbolik dan minim konsolidasi struktural. Penelitian ini merekomendasikan agar PSI ke depan menggabungkan pendekatan figur dengan penguatan struktur partai dan narasi ideologis yang konsisten.

**Kata kunci:** Kaesang Pangarep, Partai Solidaritas Indonesia, strategi politik, Perolehan Suara, Pemilu 2024

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the strategy behind the appointment of Kaesang Pangarep as Chairman of the Indonesian Solidarity Party (PSI) and its impact on the party's vote share in the 2024 General Election. Kaesang, a public figure and son of President Joko Widodo, was appointed as party chairman only two days after officially becoming a PSI member. This research uses a qualitative approach with descriptive methods and in-depth interviews involving five sources, including political analysts, academics, and PSI insiders. The findings show that Kaesang's appointment increased PSI's visibility in public discourse and social media, particularly among young voters. However, the strategy did not significantly raise the party's vote share to surpass the parliamentary threshold. The study also reveals that although Kaesang possesses symbolic, social, economic, and moral capital, the strategy is viewed as overly symbolic and lacking in structural consolidation. This research recommends that PSI should integrate figure-based strategies with institutional strengthening and a consistent ideological narrative in the future.*

**Keywords:** Kaesang Pangarep, Indonesian Solidarity Party, political strategy, vote share, 2024 General Election

## <sup>26</sup> BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Partai sebagai lembaga sosial politik mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Partai berbeda dengan lembaga lainnya karena dengan kehadiran partai mampu memberikan perubahan dalam masyarakat. Dikarenakan partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah bagi kepentingan publik yang ingin disuarakan dan nantinya menjadi sebuah kebijakan publik. Hal ini mengakibatkan sebuah partai politik harus memiliki kemampuan untuk menaikkan elektabilitasnya demi bisa bersaing dalam kontestasi politik.

<sup>28</sup> Partai Solidaritas Indonesia atau yang selanjutnya disebut PSI merupakan salah satu partai baru di Indonesia yang hadir dengan ide dan gagasan yang baru. Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang berdiri setelah pemilu 2014, PSI hadir dengan tujuan mengembalikan kesadaran bahwa politik tidak seburuk yang digambarkan. PSI berdiri berdasarkan pada empat nilai yang mencerminkan identitasnya, yaitu kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi. Hal ini pertama kali bagi sebuah partai politik di Indonesia yang dimana tidak memaksakan kebenaran tetapi mengikutsertakan partisipasi publik dan keterbukaan dalam partainya (PSI.id, 2023).

PSI sebagai partai politik baru berusaha untuk menciptakan identitas yang menjadi ciri mereka, yaitu sebagai partainya anak muda. Hal ini dikarenakan pada pemilu tahun 2019 pemilih muda berdasarkan klasifikasi usia pemilih 20 tahun terdapat sebanyak 17.501.278 orang dan usia 21-30 sebanyak 42.843.792 orang. Berdasarkan pada hal tersebut PSI semakin menekankan identitasnya sebagai partai anak muda dengan tujuan untuk menarik suara dari anak muda pada pemilu tahun 2019. Di sisi lain pada menjelang pemilu 2024 semakin menggiatkan identitas tersebut dengan mengisi struktural internalnya anak muda (Handayani, 2019).

Pada media sosial seperti twitter dan Instagram, PSI sangat gencar untuk mempromosikan partainya sebagai partai yang identik dengan anak muda. Tidak hanya di media sosial, promosi secara nyata pada baliho-baliho menggunakan visualisasi yang tidak terlalu kaku dan tidak terlalu serius seperti partai-partai lain. PSI berusaha menunjukkan partai politik juga bisa dilakukan secara santai dan gembira. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSI juga tidak terlalu kaku dan berusaha menampilkan kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak muda. Identitas sebagai partai anak muda makin diperkuat dengan rekrutmen kadernya untuk calon legislatif yang sebagian besar diisi oleh anak muda.

Melihat kembali pada identitas yang dibangun oleh <sup>6</sup>Partai Solidaritas Indonesia, yaitu partai golongan muda di Indonesia. Visi yang dibawa oleh PSI adalah Pancasila dan pluralisme dengan mengedepankan cara-cara modern dan teknologi serta menjadikan anak muda sebagai pelopor dalam partainya. Berdasar data KPU RI mengenai daftar calon sementara untuk legislatif pemilu 2024, PSI tercatat mengajukan bakal calon legislatif dengan rentang usia 21-30 tahun ada 174 bakal calon legislatif. Sedangkan, pada usia 31-40 tahun terdapat 146 bakal calon legislatif. Kemudian, jika dibandingkan bakal calon legislatif rentang usia 41-50 terdapat 149 bakal calon legislatif, lalu pada rentang usia 51-60 hanya terdapat 79 bakal calon legislatif (KPU, 2023). Berdasar pada data tersebut, terlihat bahwa PSI menunjukkan bahwa citra sebagai anak muda terealisasi melalui bakal calon legislatif yang mereka usung.

Pada pemilu tahun 2019 PSI hanya mendapat 1,89% yang setara dengan 2.650.361 suara. Kegagalan tersebut berimbas pada pergantian ketua umum PSI dari yang semula Giring Ganesha menjadi Kaesang Pangarep. Pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI dikarenakan PSI dan Kaesang memiliki kesamaan persepsi, yaitu mengutamakan anak muda dalam politik. Namun, dalam pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI terdapat keanehan karena Kaesang baru tiga hari bergabung menjadi kader PSI. Hal tersebut

mengundang opini beragam dari masyarakat, namun pemilihan Kaesang tetap menjadi penguatan identitas PSI sebagai partai anak muda. Karakteristik Kaesang sebagai anak muda yang santai dan kreatif dibuktikan dengan banyaknya usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu pemilihan Kaesang sebagai ketua umum semakin memperlihatkan usaha dari PSI untuk memperkuat identitasnya sebagai partai anak muda.

Melihat pada hasil perhitungan elektabilitas PSI pada masa Giring menjadi ketua umum, merujuk pada tiga lembaga survei, yaitu pada Poligov Strategic Consulting memperoleh suara 1%, kemudian pada Populi Center mendapat suara 0,7% lalu pada Charta Politika Indonesia memperoleh suara 0,7%. Perolehan suara tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan ketika pemilu 2019 yang memperoleh 1,89% (CNBC Indonesia, 2024). Beberapa alasan yang mempengaruhi menurunnya elektabilitas PSI dibawah kepemimpinan Giring, antara lain karena menyinggung persoalan pemolitisasi agama yang mana berdampak pada ketersinggungan beberapa masyarakat dari salah satu agama. Lalu, kontroversinya mengenai ambisi untuk menjadi calon presiden, terdapat kontroversi dari narasi yang Giring katakan karena dianggap menjadi guyonan dan menimbulkan pandangan negatif masyarakat yang disebabkan pembawaannya tidak menunjukkan ketidakseriusan ketika menjajaki dunia politik.

Di sisi lain, kehadiran Kaesang sebagai ketua umum PSI menurut beberapa lembaga survei menunjukkan hasil yang positif. Beberapa diantaranya, pada survei yang dilakukan oleh LSJ, Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 3,5%, lalu pada LSN mendapat 3,1%. Pada survei yang dilakukan oleh Median memperoleh 2,9%, berdasarkan tiga lembaga survei tersebut memperlihatkan kenaikan elektabilitas PSI setelah diangkatnya Kaesang sebagai ketua umum (CNBC Indonesia, 2024). Faktor yang mempengaruhi diperkirakan dapat meningkatkan elektabilitas PSI di masa kepemimpinan Kaesang, yaitu adanya dukungan dari modal yang dimilikinya. Modal-modal tersebut diantaranya,

*coattail effect* dari kedekatannya dengan Joko Widodo, dengan pekerjaannya sebagai publik figur dan anak muda yang senang membicarakan politik dengan gaya baru.

Pemilihan Kaesang menjadi ketua umum PSI bisa dijadikan landasan oleh PSI untuk menaikkan elektabilitasnya pada pemilu 2024. Alasan tersebut dikarenakan Kaesang mempunyai modal politik yang besar. Merujuk pada pendapat <sup>81</sup> Prof. Hamdi Muluk Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia menjelaskan bahwa modal politik yang dimiliki Kaesang besar karena dia memiliki keterikatannya sebagai anak Joko Widodo (Firmansyah, 2023). Selain itu, Kaesang sebagai anak muda yang memiliki pengaruh turut menjadi modal politik untuk dijadikan Ketua Umum PSI. Sebelum terjun ke dunia politik, Kaesang adalah *influencer* yang memiliki 3,6 juta pengikut pada akun instagram dan 2,2 juta *subscriber* pada kanal youtube.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang keluarga Kaesang memiliki andil yang cukup besar dalam pemilihannya menjadi <sup>1</sup> ketua umum PSI. Kaesang yang notabene adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo ikut terkena dampak dari elektabilitas Jokowi. Jokowi selama masa kepemimpinannya memiliki tingkat kepuasan publik mencapai 80% dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa semakin menaikkan nama baik Jokowi dan orang-orang disekitarnya. Hal tersebut menjadi poin tambahan bagi modal politik Kaesang.

Selain itu, Kaesang yang dikenal masyarakat sebagai seorang *influencer* atau pesohor juga kemudian dijadikan strategi oleh PSI untuk menarik suara dalam pemilu 2024 dengan memanfaatkan *Reverse coattail effect* sebagai seorang yang memiliki pengikut untuk mendongkrak suara keterpilihan caleg dari PSI. Dengan begitu, maka diharapkan kehadiran Kaesang akan meningkatkan elektabilitas partai. Merujuk pada survei databoks (2023) mengenai terpilihnya Kaesang sebagai Ketum PSI mendapat respon baik sebanyak 38,7% dari masyarakat yang menyatakan Kaesang akan membawa <sup>84</sup>

dampak positif dalam politik karena menunjukkan hadirnya anak muda dalam struktural partai politik.

<sup>30</sup> Penelitian ini diharapkan membawa kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian khusus mengenai partai politik, terkhusus mengenai modal politik yang dimiliki seseorang yang berimbas pada elektabilitas partainya. Hadirnya fenomena Kaesang sebagai anak muda yang diangkat menjadi ketua umum PSI, membuka persepsi bahwa anak muda dapat mengisi struktural penting dalam internal partai. Namun, penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana modal politik berperan besar pada karir politik orang tersebut.

Kaesang sebagai anak muda yang aktif di media sosial, serta turut membahas isu-isu politik secara lebih santai melalui akun media sosial yang dimilikinya, maka berdampak pada cara pandang anak muda melihat kepekaan kaesang terhadap isu sosial politik dengan cara pengemasan yang berorientasi anak muda. Dengan begitu, diharapkan akan mendulang suara dari pemilih anak muda. Selain itu, kehadiran kaesang sebagai anak dari presiden Jokowi juga menjadi suatu modal dalam menaikkan elektabilitas. Hal tersebut dikarenakan Jokowi memiliki pendukung yang militan dan berpengaruh untuk mendulang suara dari modal <sup>34</sup> tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mampu menjelaskan dinamika yang ada dalam strategi PSI dalam pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum partai terhadap elektabilitas yang ingin dicapai partai tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian terdahulu yang terlampir pada tulisan di atas, <sup>32</sup> menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi <sup>1</sup> Pengangkatan Kaesang Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Elektabilitas <sup>58</sup> PSI Pada Pemilu 2024”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis berpendapat bahwa pola strategi PSI dalam mengusung Kaesang sebagai ketua umum PSI merupakan fenomena baru yang berbeda dikarenakan kehadiran Kaesang sebagai anak muda yang baru masuk ke dalam perpolitikan Indonesia. Dengan begitu penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana pengaruh strategi pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu 2024?”**

## 1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berfungsi untuk menegaskan fokus penelitian secara jelas, sehingga penelitian difokuskan pada data yang relevan dan sesuai dengan topik yang diteliti. Penelitian ini akan berfokus pada strategi pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia terhadap perolehan suara PSI pada Pemilu 2024, dengan melihat modal politik yang dimiliki oleh Kaesang. Penulis pada penelitian ini menggunakan teori modal politik menurut Kimberly L. Casey, serta menganalisis menggunakan data-data yang didapat oleh penulis.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

### 1.4.1. Tujuan Praktis

Pada penelitian ini memiliki tujuan praktis untuk mengetahui pengaruh kehadiran Kaesang sebagai ketua umum PSI terhadap elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu 2024.

#### 1.4.2. Tujuan Teoritis

Pada penelitian ini memiliki tujuan teoritis sebagai pengembangan ilmu politik terkhusus faktor keberhasilan tokoh sentral dalam menaikkan elektabilitas partai.

#### 42 1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat, untuk:

##### 1.5.1. Manfaat Praktis

61  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca untuk memahami pengaruh tokoh populer terhadap elektabilitas suatu partai.

##### 3 1.5.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi landasan dan referensi untuk penelitian dengan bahasan yang sejenis.  
17

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal penelitian ini, yaitu:

##### BAB I

##### PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisikan informasi mengenai konteks permasalahan, rumusan masalah yang berisikan pertanyaan penelitian yang akan digunakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Selain itu, pada bab ini menguraikan mengenai batasan masalah atau fokus dari penelitian ini.  
50  
40

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian mengenai rincian teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Di sisi lain, bab ini berisikan kerangka berpikir penulis dalam menyusun penelitian. Selain itu, kami juga akan menyajikan tinjauan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian kami, baik dalam bentuk kesamaan maupun perbedaan, untuk menunjukkan inovasi yang ada dalam penelitian yang dilakukan penulis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang menjadi dasar proses penyusunan penelitian, berupa objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu mengenai kerangka ketepatan waktu penulis menyelesaikan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian berbentuk data dengan berdasar pada sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasar pada subjek dan objek penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan uraian penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan meliputi uraian analisis temuan hasil penelitian. Serta, saran adalah harapan penulis pada penelitian ini agar tujuan dan manfaatnya dapat tercapai bagi pihak terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini, berisi tentang daftar referensi yang dipakai oleh peneliti sebagai sumber acuan yang berasal dari berbagai bahan, seperti buku, jurnal, internet dan lain-lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dari permasalahan tersebut, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, peneliti juga menyelidiki beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa studi sebelumnya ini akan diuraikan di bawah ini:

Penelitian terdahulu pertama, yakni penelitian yang ditulis oleh *Ardi Rusman, Ali Rafni, dan Suryanef* (2022), dengan judul **“Modal Sosial Jokowi Dengan Politik Keekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta dan Medan”**. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai modal sosial Jokowi menjadi jaringan yang kuat dalam memenangkan arena politik. Hal ini yang dimanfaatkan oleh keluarganya untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah meneliti efek modal sosial Jokowi, yaitu politik keekerabatan yang berdampak pada naiknya elektabilitas orang-orang terdekat Jokowi. PSI sedang menggunakan strategi politik keekerabatan dengan merekrut Kaesang sebagai kader dan menjadikannya ketua umum PSI untuk menaikkan elektabilitas PSI. Di sisi lain, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti politik keekerabatan Jokowi pada pilkada 2020 yang berhasil dimenangkan oleh Gibran dan Bobby. Sedangkan, penulis meneliti politik keekerabatan yang digunakan oleh PSI dengan mengangkat Kaesang sebagai ketua umum yang notabene adalah anak bungsu dari Jokowi.

Penelitian kedua, yakni penelitian yang dilakukan oleh *Talitha Zerlina Surya Dewa, Wawan Sobari, dan Ibnu Asqori Pohan* (2020), dengan judul **“Efek Jokowi atau Efek Krisdayanti? Analisis Fenomena Efek Ekor Jas Terbalik Oleh Pesohor Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019”**. Penelitian tersebut membahas terpilihnya Krisdayanti sebagai anggota DPR yang merupakan politisi selebriti, faktor kemenangannya bukan hanya dari

dirinya sendiri tetapi terdapat faktor lain dari tim suksesnya. Penelitian ini juga membahas peranan Krisdayanti sebagai *celebrity endorser* yang mana juga kader PDIP ikut andil untuk mengiklankan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk diketahui oleh pengikutnya di media sosial yang berakibat pada <sup>15</sup> kemenangan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Persamaan penelitian terdahulu adalah membahas Kaesang dan Krisdayanti yang memiliki kesamaan berprofesi selebriti dan aktif berpolitik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Krisdayanti menyokong <sup>15</sup> Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden, sementara Kaesang menyokong kader PSI untuk masuk dalam legislatif pada pemilu 2024. Selain itu, terdapat perbedaan pada partai pengusung, yaitu pada penelitian terdahulu PDIP dan penelitian peneliti PSI.

Penelitian ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh <sup>22</sup> M. Rizky Ganda Hutama, Ratnia Solihah, dan Firman Manan (2021), dengan judul **“Dilema Penggunaan Figur Sentral: Antara Idealisme dan Kebutuhan Suara Bagi Partai Solidaritas Indonesia”**. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pilihan masyarakat yang masih berbasis pada keberadaan tokoh sentral atau populer yang berada dalam partai tersebut. Jika PSI masih mengedepankan idealismenya, maka sulit untuk menaikkan elektabilitas dalam mencari suara saat pemilu. Oleh karena itu, ketepatan pemilihan tokoh dalam menunjukkan identitas PSI sebagai suatu partai penting guna mendapatkan suara dukungan dari pendukung tokoh tersebut. Dengan begitu, maka suara terhadap tokoh akan berdampak juga terhadap dukungan dari partai pengusung tokoh tersebut. <sup>1</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai pengaruh seorang tokoh dalam suatu partai, untuk menaikkan elektabilitas partai tersebut. Merujuk pada latar belakang dan modal politik yang dimiliki oleh tokoh. Di sisi lain, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas kekurangan dan kelebihan penggunaan tokoh sentral untuk menaikkan elektabilitas melalui suara pendukung tokoh tersebut. Namun, pada penelitian penulis membahas mengenai dampak dari kehadiran tokoh sentral,

yaitu Kaesang untuk menaikkan elektabilitas PSI dalam pemilu 2024 yang berasal dari modal politik yang dimiliki Kaesang.

Penelitian keempat, yakni <sup>12</sup> penelitian yang dilakukan oleh *Muhammad Syamsul Hidayat dan Sri Budi Eko Wardani* (2022), dengan judul **“Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang”**. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai terjadinya <sup>15</sup> politik kekerabatan dan praktik klientelistik di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang pada keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar. Penelitian tersebut menjelaskan cara politik kekerabatan dan praktik klientelistik yang berbeda dari dua keluarga, seperti keluarga Jayabaya melibatkan keluarganya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan keluarga Iskandar memanfaatkan pendukungnya yang merupakan kyai dan jawara dengan mengumpulkannya dalam satu wadah untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian pola kontrol yang kuat pada keduanya menyebabkan partai-partai politik memberikan dukungan pada keduanya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah membahas politik kekerabatan dan hadimya pola kontrol kuat pada satu tokoh yang berakibat pada keuntungan pihak lain yang terkait dengan tokoh tersebut. <sup>51</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas klientelistik, sedangkan <sup>25</sup> penelitian yang dilakukan penulis berfokus loyalitas pendukung Jokowi yang dinamai oleh PROJO yang diharapkan akan memberikan dukungan pada Kaesang dan nantinya berimbas pada naiknya elektabilitas PSI.

Penelitian kelima, yakni penelitian yang dilakukan oleh <sup>25</sup> *Devy Putri Kussanti, Susilowati, Rety Palupi, dan Dobrin Tsvetanov Bugov* (2023), dengan judul **“Politainment Dalam Debut Awal Politik Kaesang Pangarep Terhadap Preferensi Warga Depok”**. Penelitian ini membahas mengenai Kaesang yang memanfaatkan media sosialnya untuk memberi tahu segala kegiatannya dan mempromosikan bisnisnya, hingga menunjukkan adanya

interaksi dengan para pengikutnya. Namun, semenjak pemilu 2019, Kaesang mulai aktif untuk memberikan pandangan politiknya, bahkan berdiskusi dengan pengikutnya melalui media sosial. Hal itu menciptakan citra pada dirinya, yaitu anak muda yang aktif, berwawasan, dan mengemas politik menjadi lebih santai. <sup>62</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membangun citra politik yang tidak kaku, santai, dekat dengan anak muda, melalui personifikasi yang dibangun oleh Kaesang. Citra yang dibangun di media sosial serta interaksi yang dilakukannya menjadi nilai tambah dalam modal politiknya, terutama dalam menjadi ketua umum PSI. Lalu, perbedaan <sup>20</sup> penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu hanya berfokus *politainment* Kaesang dalam membangun citra dirinya untuk preferensi Warga Depok. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai modal politik kekeluargaan yang dimiliki oleh Kaesang yang berdampak pada elektabilitas PSI secara nasional.

Penelitian keenam, yakni penelitian yang dilakukan oleh *Patricia Durántez-Stolle dan Raquel Martínez-Sanz* (2018), dengan judul <sup>70</sup> **“*Politainment in the Transmedia Construction of the Image of Politicians*”**. Penelitian tersebut membahas hadirnya media sosial untuk membentuk karakteristik yang ingin dibangun oleh politisi tersebut. Namun, media sosial merupakan ruang bebas dimana orang lain mempunyai andil untuk membentuk karakteristik seseorang, termasuk politisi. Pada media sosial juga menunjukkan dua sudut pandang berbeda dalam satu penayangan bagi politisi terkait seperti halnya, perbandingan antara anekdot dan informasi, profesionalitas dan personalisasi. Maka, persamaan <sup>6</sup> penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah menunjukkan bagaimana mereka membangun personalisasi menggunakan media sosial. Di sisi lain, <sup>18</sup> perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu hanya membahas mengenai *branding* seorang politisi, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas *branding* akan tetapi membahas bagaimana hasil dari *branding* di media sosial.

Penelitian ketujuh, yakni <sup>89</sup>penelitian yang dilakukan oleh *Adrian Revananza* (2022), dengan judul **“Strategi PSI Jakarta Dalam Mendulang Suara Pada Pemilu 2019”**. Penelitian tersebut membahas mengenai PSI sebagai partai anak muda yang menunjukkan identitas anak muda dengan kehadiran struktural yang diisi oleh anak muda. <sup>76</sup>Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai **hambatan** yang ditemui PSI dalam menghadapi pemilu 2019, mengenai adanya serangan informasi palsu untuk tujuan pengiringan informasi masyarakat. Serta, biaya politik yang cenderung besar juga menjadi salah satu hambatan utama PSI saat pemilu 2019. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah menunjukkan bagaimana PSI mengedepankan identitas partai anak muda dengan mengisi struktural kepengurusan partainya dengan anak-anak muda. Namun, <sup>20</sup>perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan PSI dalam menghadapi pemilu 2019. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana strategi PSI dalam menghadapi pemilu 2024 dengan mengusung Kaesang sebagai ketua umum partai untuk mendulang suara dari pendukungnya dan anak muda lainnya.

Penelitian kedelapan, yakni penelitian yang dilakukan oleh <sup>8</sup>*Nina Andriana* (2022), dengan judul **“Pandangan Partai Politik Terhadap Media Sosial Sebagai Salah Satu Alat Komunikasi Politik Untuk Mendekati Pemilih Muda (Gen Y dan Z): Studi Kasus PDI-P dan PSI”**. Penelitian tersebut membahas adanya dua latar belakang partai berbeda, yaitu PDIP dengan *wong cilik*-nya dan PSI sebagai partai anak muda, keduanya menyadari dengan perkembangan teknologi maka terdapat cara komunikasi baru melalui media sosial. Dengan begitu mereka memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk memperkenalkan partai politiknya kepada para pemilih muda dengan lumbung suara terbanyak untuk menaikkan elektabilitas partai tersebut. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah meneliti bahwa anak muda dapat membawa keuntungan sebagai pemberi suara pada partai-partai tersebut. Dengan begitu, maka tiap partai membentuk strategi menggunakan anak muda sebagai kadernya untuk melakukan pendekatan

komunikasi yang digemari oleh anak muda itu sendiri. Pembeda dari penelitian<sup>6</sup> terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu berfokus pada strategi komunikasi untuk menaikkan elektabilitas partai, sedangkan penelitian penulis menjelaskan keterlibatan kader muda dalam partai juga penting, dalam hal ini adalah Kaesang serta membahas mengenai modal politik yang dimilikinya.

Penelitian kesembilan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurlela, Jumadi, dan Nurkhasa Khaer Hanafie (2019), dengan judul "*Modality of Election in Young Legislative Election Contestation in South Sulawesi*". Penelitian tersebut membahas pentingnya suatu modal bagi seseorang untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Modal tersebut diantaranya adalah modal politik, modal ekonomi, modal sosial, dan budaya. Apabila seseorang ingin berkontestasi harus memiliki modal-modal tersebut untuk menarik suara pemilih. Persamaan penelitian<sup>18</sup> terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai modal politik yang dimiliki oleh kader partai politik. Dalam hal ini, Kaesang yang memiliki modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial.<sup>66</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas kontestasi legislatif di Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Kaesang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia.<sup>105</sup>

Penelitian kesepuluh, yakni penelitian yang dilakukan oleh Atie Rachmiatie, Ferra Martian, dan Maman Suherman (2020), dengan judul "*Young Political Affirmations in Accelerating Re-Generation in Political Parties*". Penelitian tersebut membahas mengenai partai-partai baru yang diisi oleh generasi milenial dengan tujuan untuk meregenerasi politik melalui partisipasi dan pemahaman tentang partai politik. Selain itu, partai terdahulu juga ikut serta dalam regenerasi dengan memberikan kesempatan bagi kader muda mengisi posisi strategis di struktural.<sup>98</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas pentingnya kehadiran kader muda

pada struktural partai politik. Selain itu, terdapat kesamaan objek penelitian yaitu, PSI dalam meneliti fenomena yang ada. Namun, <sup>31</sup> perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada regenerasi partai yang diisi oleh anak muda. Sedangkan, penelitian penulis mengambil sudut pandang lainnya mengenai modal politik yang dimiliki dan dampak hadirnya kader tersebut bagi elektabilitas partai.

Berdasarkan pada beberapa uraian penelitian terdahulu mengenai hadirnya Kaesang pada perpolitikan di Indonesia maupun mengenai modal politik yang dimilikinya, maka belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis mengenai pengaruh <sup>103</sup> pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI terhadap elektabilitas PSI pada pemilu tahun 2024 yang merujuk pada kepemilikan modal politik yang dimiliki Kaesang. Dengan begitu, hal tersebut menjadi alasan <sup>65</sup> bahwa penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian lainnya.

## <sup>75</sup> 2.2. Konsep dan Teori

### 2.2.1. Teori Modal Politik

Dalam penelitian yang dilakukan Kimberly L. Casey (2008), modal politik adalah kumpulan dari berbagai modal yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu tindakan politik. Modal politik menjadi dasar kandidat politik untuk memenangkan pertarungan politik, kandidat yang memiliki modal politik besar mempunyai kesempatan memenangkan kontestasi politik. Dalam modal politik dapat membahas pengaruh lembaga politik untuk pemenangan kandidat dalam kontestasi politik. Lembaga politik menjadi salah satu pengaruh untuk kemenangan kandidat karena merupakan modal politik kelembagaan. Dalam penelitiannya Casey membagi <sup>5</sup> modal politik menjadi tujuh, yaitu modal kelembagaan, modal sosial, modal manusia, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal budaya. Modal politik menjadi dasar kandidat politik untuk memenangkan pertarungan politik, kandidat yang

memiliki modal politik besar mempunyai kesempatan memenangkan kontestasi politik.

Modal politik yang pertama adalah modal lembaga, yaitu suatu organisasi yang mempunyai struktur <sup>34</sup> dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Partai politik merupakan elemen utama yang memiliki keterkaitan paling erat antara proses pencalonan dan institusi politik. Kaesang dalam hal ini memiliki modal lembaga, yakni PSI sebagai partai politiknya. Kaesang menjadikan PSI sebagai pijakan untuk masuk dalam dunia perpolitikan Indonesia karena Kaesang masuk ke dalam partai politik yang menyatakan dirinya sebagai partai anak muda. Di sisi lain, bentuk kerja sama yang terjadi di PSI adalah menaikkan Kaesang sebagai ketua umum dan perombakan struktural yang diisi oleh anak muda dengan tujuan untuk mempengaruhi elektabilitas PSI di Masyarakat terutama pada anak muda.

Modal kedua adalah modal sosial dalam konteks ini, modal sosial terkait dengan hubungan jaringan sebagai sumber daya untuk memperoleh kedudukan sosial, menunjukkan bahwa seseorang perlu memiliki koneksi interpersonal guna mencapai posisi di dalam kelompok sosial. Modal sosial berkaitan dengan jaringan dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini Kaesang memiliki modal sosial mengacu pada jaringan relasi dan dampak sosial yang dimilikinya sebagai figur yang terkenal dan memiliki posisi di masyarakat. Di sisi lain, Kaesang yang saat ini berposisi sebagai komisaris RANS diharapkan makin memperluas jaringan dari PSI. Jaringan yang dimiliki Kaesang dimanfaatkan oleh PSI ketika mengangkatnya menjadi ketua umum untuk menciptakan jaringan baru melalui jaringan yang dimiliki Kaesang. Selain itu, Kaesang sebagai figur yang terkenal dan memiliki pengikut yang banyak pada media sosial diharapkan para pengikutnya akan memberikan suaranya pada PSI karena terdapat Kaesang sebagai ketua umum.

Modal ketiga adalah modal manusia, yaitu modal yang berasal dari kualitas individu tersebut, seperti kecerdasan, daya tarik, dan kualitas pribadi

yang dimilikinya. Modal manusia yang dimiliki oleh Kaesang adalah pembawaan dirinya sebagai individu yang santai dan mampu menggaet para pengikutnya yang didominasi oleh anak muda. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita dari PSI yang ingin menghapus stigma buruk politik di masyarakat serta menciptakan politik riang gembira yang menyesuaikan dengan pendekatan anak muda.

Selanjutnya, modal keempat, yaitu modal ekonomi. Modal ini menjadi faktor penting ketika seseorang ingin menjadi politikus. Modal ekonomi yang dimaksud disini adalah kekayaan individu berupa materi dan uang atau, lebih tepatnya, kapasitas finansial seseorang untuk mendukung mereka. Kaesang yang memulai karirnya sebagai seorang pebisnis memiliki modal ekonomi dan mempunyai gurita bisnis di beberapa bidang (CNN Indonesia, 2023). Gurita bisnis yang dimilikinya diharapkan mampu menyokong karir politiknya sebagai ketua umum PSI.

Modal kelima adalah modal simbolik, yaitu modal yang berdasar pada latar belakang dari individu tersebut dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini Kaesang memiliki modal simbolik, yaitu status dan legitimasi sebagai anak presiden Joko Widodo, diharapkan status tersebut mempengaruhi posisinya sebagai ketua umum PSI untuk mendapat dukungan dari pendukung Jokowi. Di sisi lain, statusnya sebagai figur terkenal makin memperkuat modal simbolik yang dimilikinya.

Modal keenam adalah modal budaya, Modal budaya diperoleh dari pendidikan formal yang dilakukan oleh individu untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam strata sosial. Modal budaya dihasilkan oleh pengetahuan yang mempengaruhi pembentukan gagasan dan ide dalam pemikiran individu. Dalam hal ini Kaesang dengan bekal pendidikannya saat di perguruan tinggi, yaitu seorang lulusan marketing dengan fokus komunikasi memberikan pemikirannya untuk meningkatkan marketing dari PSI. Hal ini

terlihat dari marketing PSI yang semakin memperlihatkan identitasnya sebagai anak muda dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak muda.

Modal ketujuh, yaitu modal moral. Modal moral merupakan elemen kunci yang menjadi perhatian bagi para pelaku yang ingin memikat hati. Kaesang sebagai seorang publik figur yang memiliki pengaruh untuk memikat pengikutnya karena pembawaan dirinya yang menyenangkan dan santai. Pembawaan dirinya yang menyenangkan dan santai turut membawa pengaruh ketika dia menjabat menjadi ketua umum PSI. Dengan begitu, pembawaan dirinya diharapkan dapat menarik simpati pemilih terutama kaum muda.

### **2.2.2. Elektabilitas**

Elektabilitas menurut Seth Masket (2020) dalam bukunya menjelaskan bahwa elektabilitas merupakan bentuk pemikiran yang menyatakan terdapat calon yang mendapatkan kemudahan karena faktor-faktor yang dimiliki. Dengan kata lain, elektabilitas dapat dikatakan bahwa beberapa kandidat memiliki keuntungan atau kemudahan yang lebih besar dalam pemilihan umum dibandingkan dengan kandidat lainnya. Gagasan tersebut mungkin merujuk pada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi elektabilitas atau kemungkinan kemenangan sebuah kandidat dalam pemilihan umum.

Peacock (2021) menjelaskan dalam penelitiannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih kandidatnya. Hal tersebut berdasar pada preferensi, yaitu sikap, kepercayaan, dan opini yang terbangun pada diri pemilih berasal dari citra yang dibangun oleh para kandidat. Dengan begitu, maka menurut Peacock kandidat yang menunjukkan citra dan isu yang dibawa akan menarik minat pemilih untuk memilih mereka. Seperti halnya dalam penelitian ini dalam hal ini Kaesang membangun citra sebagai anak muda selain itu Kaesang membawa isu regenerasi anak muda dalam politik.

Di sisi lain, peranan media penting dalam membentuk citra kandidat yang berakibat pada elektabilitas mereka. Menurut penelitian Jones (2016)

mengatakan bahwa persepsi pemilih secara signifikan dipengaruhi oleh program yang mereka lihat. Oleh karena itu, media memainkan peran penting dalam pembingkaiannya kepribadian dan isu kebijakan dari kandidat yang akan mempengaruhi elektabilitas mereka. Hal tersebut terlihat dari platform media sosial yang dimiliki Kaesang membahas isu-isu politik yang ingin diperjuangkan PSI pada pemilu 2024.

Dalam meningkatkan elektabilitas seorang kandidat maka perlu dibentuk strategi yang dapat meningkatkan kesukaan kandidat melalui keterkaitan dan hubungan emosional. Menekankan daya tarik pribadi dan empati dapat memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih. Umumnya kandidat berusaha untuk membentuk suatu identitas sosial yang ditujukan untuk menarik minat pemilih agar mereka merasa terdapat kesesuaian dengan emosi dan nilai yang pemilih anut.

Pemanfaatan media massa yang massif <sup>11</sup> merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menaikkan elektabilitas seorang kandidat. Berdasarkan penelitian Wibowo (2018) beserta Supit dan Lopian (2022) mengatakan bahwa untuk menaikkan elektabilitas partai politik secara ampuh dapat menggunakan media sosial. Kaesang sebagai anak muda benar-benar memanfaatkan media sosial untuk semakin menunjukkan kesungguhannya untuk masuk ke ranah politik. Program “Podcast Depan Pintu” atau yang biasa disingkat PDP merupakan wadah yang digunakan Kaesang untuk menyuarakan pendapat dan membahas isu sosial dan politik secara lebih santai sebagai pendekatan kepada anak muda pada kanal media sosial Youtube.

### **2.2.3. Pemilu**

Pemilihan umum atau yang selanjutnya disebut sebagai pemilu menurut Sigit Pamungkas (2009: 3), merupakan suatu medan kompetisi untuk bersaing dalam rangka mengisi suatu jabatan politik dalam pemerintahan. Pilihan tersebut berdasar pada suara yang diberikan warga negara. Peserta suatu pemilu

dapat berasal dari perseorangan ataupun partai politik. Suatu partai dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengusung kandidat untuk ikut berkontestasi dalam pemilu dan akan dipilih oleh rakyat.

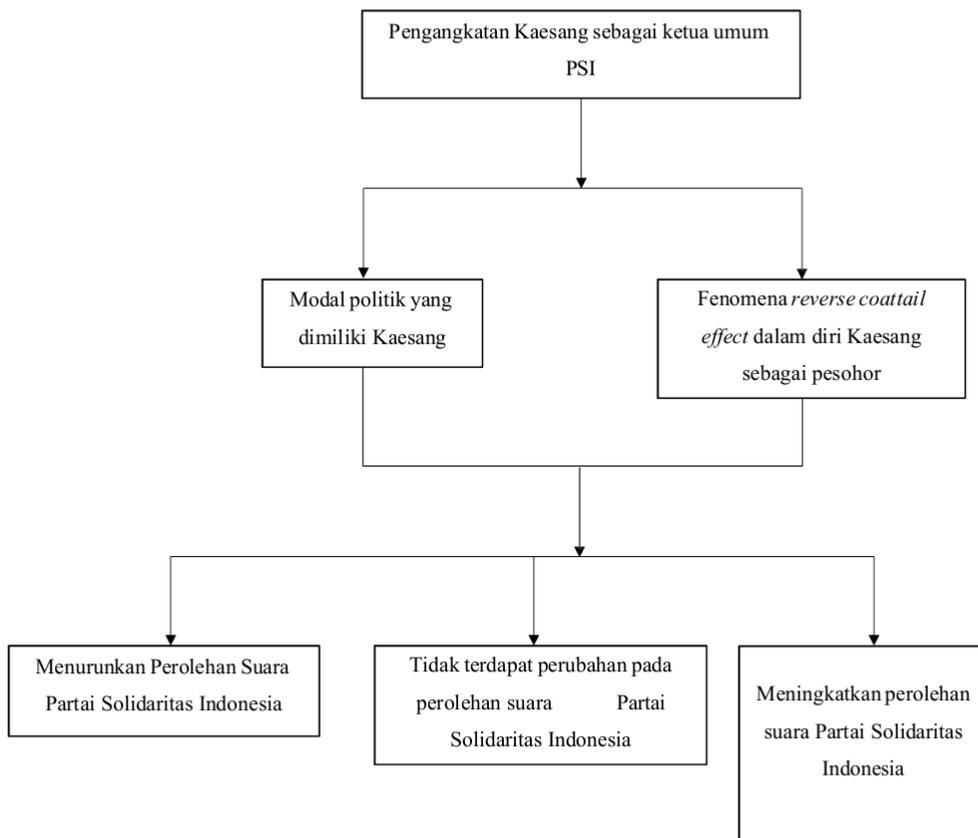
Berdasarkan <sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2017 nomor 7 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau LUBERJURDIL. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan salah satu cara untuk merealisasikan hak sipil dalam berpolitik. Selain itu, menurut Schumpeterian dalam sigit pamungkas (2009: 4) menyatakan bahwa pemilu merupakan elemen terpenting untuk mengukur demokrasi dalam suatu negara.

#### **2.2.4. Kampanye Politik**

Merujuk pada Dan Nimmo (Nimmo, 2006: 195), kampanye politik merupakan cara propaganda untuk mendapatkan suara pemilih. Berangkat dari pengertian tersebut maka kampanye politik dapat didefinisikan sebagai bentuk penyampaian pesan politik kepada masyarakat untuk mendapatkan suara pemilih dengan cara mempengaruhi opini dari masyarakat.

Kampanye politik merupakan sebuah alat komunikasi politik yang tidak bisa lepas dari bagian penting dalam politik. Kampanye politik dibuat oleh elit politik secara sistematis berdasar pada tujuan partai politik dan calon tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk mendapat suara dari pemilih dengan cara penyebaran melalui media sosial dan media massa.

### 2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2 1 Kerangka Berpikir

## <sup>9</sup> BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah komponen penelitian yang menjadi fokus penelitian untuk membedah permasalahan pada topik bahasan penelitian. **Objek penelitian** dapat berupa individu, suatu badan atau organisasi, hingga sebuah barang (Supranto, 2000: 21). <sup>87</sup> Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah strategi <sup>1</sup> pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia terhadap elektabilitas **PSI** dalam pemilu 2024.

#### 3.2. **Jenis Penelitian**

Pada penelitian yang berjudul “Strategi <sup>1</sup> Pengangkatan Kaesang Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Elektabilitas **PSI** Pada Pemilu 2024”, penulis menggunakan bentuk deskriptif dengan metodologi <sup>28</sup> kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena dalam konteks alami sebagaimana adanya, berdasarkan perspektif para partisipan, dengan intervensi minimal dari peneliti. Data pada penelitian kualitatif <sup>29</sup> tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan berasal dari <sup>30</sup> beberapa dokumen yang telah melalui validasi, kajian, penelitian, dan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa berdasarkan data di lapangan (Raco, 2010). Dengan begitu, maka dapat menjelaskan lebih dalam mengenai strategi <sup>1</sup> pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia terhadap elektabilitas **PSI** dalam pemilu 2024.

### 3.3. <sup>14</sup> Teknik Pengumpulan Data

Menurut Goetz dan LeCompte (dalam Sutopo, 2002: 58) terdapat dua pembagian teknik <sup>23</sup> pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif adalah metode pengumpulan data melalui interaksi dengan narasumber dan pengamatan secara langsung, seperti metode wawancara. Di sisi lain, metode non-interaktif merupakan metode <sup>73</sup> pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, dan artikel.

#### 3.1.1. Wawancara

<sup>100</sup> Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah teknik <sup>10</sup> pengumpulan data dengan interaksi dua arah antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data langsung dari narasumber (Arikunto, 1993: 126). Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dengan tujuan mendapatkan data lebih dalam tentang topik penelitian yang diteliti dan bisa menggali perspektif berbeda dari setiap narasumber yang diwawancara.

#### <sup>14</sup> 3.1.2. Studi Literatur

Teknik pengumpulan data dengan studi literatur merupakan pengumpulan data dalam sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Literatur yang dikumpulkan harus sesuai dengan bahasan penelitian dan nantinya dapat dijadikan acuan bagi peneliti membuat pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber, selain itu literatur bisa menjadi panduan bagi peneliti melakukan observasi awal (Nugrahani, 2014).

### 3.4. Sumber Data

Penulis mendapatkan data bagi penelitian menggunakan <sup>9</sup> dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber secara langsung.

Sementara, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya.

#### <sup>43</sup> 3.4.1. Sumber Data Primer

Upaya untuk mendapatkan sumber data primer, penulis memanfaatkan teknik wawancara dengan narasumber. Teknik wawancara digunakan oleh penulis supaya mendapatkan data valid untuk makin memperkuat dasar penelitian. Narasumber yang akan diwawancarai berasal dari internal Partai Solidaritas Indonesia dan pengamat politik. Pemilihan narasumber tersebut bertujuan supaya penelitian memperoleh data yang jelas dan pasti untuk makin memperkuat dasar penelitian. Terdapat tujuh orang yang akan dijadikan narasumber oleh penulis, yaitu:

1. Prof. A. Ramlan Surbakti, Drs., MA., Ph.d (Akademisi).
2. Ubedillah Badrun, S.Pd., M.Si. (Akademisi).
3. Andy Budiman (Wakil Ketua Umum DPP PSI).
4. Danu Wintoro, SH (Kader PSI dan Caleg).
5. Jeirry Sumampouw (Pengamat Politik dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi).

#### <sup>68</sup> 3.4.2. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini penulis turut menggunakan sumber data sekunder untuk menjadi acuan bagi penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari studi literatur yang bahasannya berkaitan dengan penelitian penulis. Studi literatur yang digunakan penulis adalah buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan berbagai studi literatur lainnya. Pengambilan data sekunder berguna untuk memperkuat acuan dasar penulis dalam melakukan penelitian terhadap strategi pengangkatan Kaesang sebagai ketua umum PSI terhadap elektabilitas PSI.

### 3.5. Teknik Analisis Data

<sup>85</sup> Menurut buku metodologi penelitian kualitatif yang ditulis oleh Noeng Muhadjir (1998: 104) teknik analisis dapat dikatakan juga sebagai cara merapikan catatan dari hasil kumpulan data yang berasal dari pengamatan dan wawancara secara terstruktur, dengan begitu peneliti dapat memperdalam terkait fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan <sup>33</sup> analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992: 16) terdiri dari empat jalur, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan <sup>26</sup> penarikan kesimpulan.

Analisis penelitian kualitatif terdiri dari empat sifat, yaitu analisis induktif, analisis lapangan, analisis interaktif, dan proses siklus. Analisis induktif, yaitu dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan menghasilkan sebuah teori yang berdasar pada kenyataan. Di sisi lain, analisis lapangan merupakan serangkaian proses <sup>26</sup> analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dilaksanakan di lapangan. Proses tersebut dapat bersamaan dilakukan saat sedang menyusun sebuah refleksi peneliti yang dapat berupa kerangka berpikir dan gagasan terhadap data yang ada. Selain itu, sifat ketiga, yaitu proses interaktif. Proses interaktif dimana data yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan data lain secara terus-menerus. Proses dilaksanakan dengan siklus yang terdiri dari penyajian data, pereduksian data, dan verifikasi. Sifat terakhir adalah proses siklus yang dimana semua data yang dikumpulkan ditarik menjadi kesimpulan dan kemudian dilanjutkan lagi dengan pengumpulan data secara kontinu. Setelah itu, pada tahap verifikasi, data yang dihasilkan kemudian dianalisis kembali terhadap bukti yang ada dan kemudian proses tersebut diulang secara terus-menerus hingga mencapai kesimpulan akhir kesimpulan (Nugrahani, 2014).

3.6. Tabel Rencana Waktu Penelitian

Tabel 3 1 Rencana Waktu Penelitian

Kegiatan	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb-Des 2024	Des-Apr 2024	Jun 2025
Pencarian judul dan penyusunan proposal						
Bimbingan proposal						
Sidang proposal						
Revisi proposal						
Pencarian data penelitian						
Pengolahan data						
Sidang Skripsi						

## <sup>4</sup> BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

##### 4.1.1. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia



Gambar 4 1 Logo Partai PSI<sup>54</sup>

Sumber: PSI.id

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI adalah sebuah partai baru yang hadir untuk menjadi kekuatan politik baru yang berkomitmen untuk memulihkan kehormatan dalam dunia politik. PSI didirikan dengan kesadaran bahwa politik adalah amanah luhur yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.<sup>24</sup> Partai Solidaritas Indonesia resmi didirikan pada 16 November 2014 sebagai respons terhadap krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik yang dianggap kehilangan integritas. PSI lahir dari kesadaran bahwa politik seharusnya menjadi ruang pengabdian yang mulia, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. Dengan membawa semangat pembaruan, PSI berupaya

mempromosikan nilai-nilai transparansi, keadilan sosial, dan kesetaraan dalam kehidupan politik Indonesia.

Proses pendirian PSI dipelopori oleh sejumlah tokoh muda yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari aktivis, jurnalis, hingga profesional. <sup>71</sup> Grace Natalie, seorang mantan jurnalis yang pernah memegang posisi penting di beberapa media nasional, menjadi salah satu tokoh kunci yang turut mendorong lahirnya PSI. Bersama dengan Raja Juli Antoni, seorang aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi masyarakat sipil, serta Tsamara Amany, seorang aktivis muda yang lantang menyuarakan isu-isu kesetaraan gender, mereka menyatukan visi untuk menciptakan partai yang berorientasi pada pembaruan politik.

Dalam rangka memperoleh legitimasi formal, PSI mengajukan pendaftaran ke <sup>72</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2016. Setelah melalui proses verifikasi administratif dan faktual, PSI berhasil memperoleh status sebagai partai politik yang sah pada Oktober 2016. Pencapaian ini menandai langkah awal PSI dalam kancah politik nasional, dengan komitmen untuk menghadirkan wajah politik yang lebih bersih dan berintegritas.

Meskipun masih tergolong partai kecil dalam hal perolehan suara pada Pemilu 2019, PSI tetap konsisten memperjuangkan isu-isu strategis seperti pemberantasan korupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak minoritas. Dengan visi menjadikan politik sebagai sarana pelayanan publik yang bermartabat, PSI berupaya memperkuat posisinya sebagai alternatif politik progresif yang merepresentasikan aspirasi generasi muda dan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem politik <sup>4</sup> Indonesia.

#### 4.1.2. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan buku ABC dari <sup>6</sup> Partai Solidaritas Indonesia terdapat visi dan misi yang menjadi dasar dan tujuan PSI berdiri sebagai partai politik. Visi dari PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. Selanjutnya, terdapat empat misi untuk mewujudkan visi dari PSI, yaitu:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republik, merajut kembali rasa kebangsaan yang tersesak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

#### 4.1.3. Prinsip Politik Partai Solidaritas Indonesia

Dalam menjalankan aktivitas politiknya, baik di parlemen maupun di masyarakat, PSI memiliki sembilan prinsip politik yang bertujuan menciptakan politik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Partai moderen yang <sup>3</sup> terbuka, demokratis, dipimpin, berbasis platform, budaya partisipasi, berkemajuan.
2. Kemajemukan/pluralisme
3. Demokrasi substantif/demokrasi sosial
4. Demokrasi ekonomi

5. Kesetaraan dan keadilan gender

6. Negara kesejahteraan

7. Hak asasi manusia

8. Penghormatan ekologis

9. Keadilan sosial

#### 4.2. Situasi Politik Partai Solidaritas Indonesia Pasca Pemilu 2019

Setelah pelaksanaan Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam upayanya untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di kancah politik nasional. Dalam pemilu tersebut, PSI berhasil memperoleh sekitar 1,89% suara, yang meskipun menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, masih jauh dari ambang batas parlemen yang ditetapkan (KPU, 2019). Hasil ini menegaskan perlunya PSI untuk segera melakukan evaluasi terhadap strategi kampanye yang telah diterapkan, termasuk metode komunikasi dan interaksi dengan pemilih. Proses evaluasi<sup>99</sup> ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemilu serta untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depan. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap data pemilih dan tren politik menjadi<sup>93</sup> sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif.

Pasca pemilu, PSI dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk meningkatnya persaingan politik dan perubahan preferensi pemilih. Isu-isu sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan kebutuhan akan representasi yang lebih baik, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh PSI.<sup>64</sup> Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan basis dukungan yang relatif muda dan progresif, PSI memiliki kesempatan untuk menarik perhatian pemilih yang menginginkan perubahan dan inovasi dalam politik Indonesia. Dalam hal ini, PSI perlu memanfaatkan platform

digital dan media sosial untuk menjangkau pemilih muda yang lebih aktif dan terhubung secara online.

Dalam upaya untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, PSI melakukan perubahan dalam strategi dan arah kebijakan. Partai ini berfokus pada penguatan citra sebagai partai yang peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Selain itu, PSI berusaha untuk memperkuat basis dukungan di kalangan pemilih muda melalui program-program yang relevan dan menarik. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik PSI di mata pemilih yang lebih luas, terutama generasi milenial dan Z yang semakin kritis terhadap isu-isu politik. (Elizabeth et al., 2019). Dengan mengedepankan isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, PSI dapat membangun koneksi emosional yang lebih kuat dengan pemilih.

Dinamika internal partai juga memainkan peran penting dalam situasi politik PSI pasca pemilu. Perubahan kepemimpinan dan restrukturisasi organisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas partai dalam merespons tantangan yang ada. Keterlibatan anggota partai dan kader dalam merumuskan visi dan misi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam membangun solidaritas dan kekuatan internal. Dengan demikian, PSI berupaya untuk menciptakan sinergi antara kepemimpinan, anggota, dan masyarakat, yang diharapkan dapat memperkuat posisi partai dalam menghadapi Pemilu 2024.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana PSI membangun jaringan dan aliansi strategis dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok pemuda. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas jangkauan PSI, tetapi juga memberikan legitimasi tambahan terhadap posisi partai sebagai representasi suara rakyat. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, PSI dapat memperkuat basis dukungan dan meningkatkan visibilitasnya di kalangan pemilih yang lebih luas. Selain itu, keterlibatan dalam isu-isu sosial

yang relevan dapat membantu PSI untuk membangun citra sebagai partai yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi PSI untuk mengembangkan program-program yang konkret dan terukur, yang dapat menunjukkan komitmen partai terhadap perubahan sosial. Misalnya, program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih. Dengan menunjukkan hasil nyata dari program-program tersebut, PSI dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan elektabilitasnya. Hal ini juga sejalan dengan upaya PSI untuk menjadi partai yang tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata.

Melalui analisis situasi politik pasca Pemilu 2019, dapat disimpulkan bahwa PSI berada dalam fase transisi yang krusial. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi, PSI berpotensi untuk meningkatkan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2024. Pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi partai dan menarik perhatian publik.

#### 4.3. Strategi Pengangkatan Kaesang Menjadi Ketua Umum PSI

Pengangkatan <sup>44</sup> Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat dan menjadi sorotan publik serta pengamat politik nasional. Kaesang resmi menjadi anggota PSI pada tanggal 23 September 2023 setelah <sup>21</sup> menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSI saat itu, Giring Ganesha. Penyerahan KTA tersebut berlangsung di kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, dan menjadi simbol masuknya putra bungsu presiden ke dunia politik secara formal (Kompas.com, 2025). <sup>1</sup> Hanya dua hari berselang, tepatnya <sup>36</sup> pada 25 September 2023, PSI mengumumkan secara resmi pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023–2028

dalam acara bertajuk *Kopi Darat Nasional (Kopdarnas)* yang digelar di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, membacakan surat keputusan partai yang menetapkan Kaesang sebagai pemimpin baru PSI (Antaranews.com, 2023). Seremoni ini ditutup dengan penyerahan simbol partai berupa bunga mawar dari Giring Ganesha kepada Kaesang sebagai simbol peralihan kepemimpinan (Asia News Network, 2023). PSI berharap dengan kehadiran Kaesang sebagai representasi anak muda dapat memberikan dampak positif dan menarik perhatian publik, terutama di kalangan generasi muda. Strategi pengangkatan Kaesang yang bertujuan untuk mendongkrak suara PSI pada kalangan generasi muda sejalan dengan yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, yaitu

*“Pertama gini, pemilu 2024 itu, sekitar 55%-nya itu adalah Gen Z dan juga Millenials. Ini datanya ya, jadi sehingga sebagian besar itu adalah anak muda. Nah, kita tahu di antara seluruh partai politik yang ada di Indonesia, tidak ada yang betul-betul merepresentasikan atau mewakili profil demografi anak muda di pemilih terbesar tadi. Jadi, ironisnya, tidak terrepresentasi. Kehadiran Kaesang sebagai anak muda tentu ini akan memberikan jawaban kepada pertanyaan atau aspirasi anak-anak muda yang ingin ada sosok yang bisa mewakili mereka di pentas nasional, di level politik nasional. Sehingga kehadiran Kaesang menjadi representasi kekuatan baru dari anak muda untuk membuat PSI semakin relate dengan anak muda.”* (Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024)

Secara prosedural, proses pengangkatan ini tidak melalui mekanisme formal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa pemilihan Ketua Umum seharusnya dilaksanakan melalui forum tertinggi seperti Kongres Nasional atau forum musyawarah besar yang melibatkan seluruh struktur kepartaian, termasuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Namun, dalam kasus Kaesang, penunjukan dilakukan melalui Kopdarnas yang tidak memiliki kedudukan formal sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam AD/ART (Republika, 2023). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan proses pengangkatan

tersebut, karena mekanisme kaderisasi dan seleksi internal seakan-akan dilewati secara instan. Grace Natalie, sebagai perwakilan elit partai, menegaskan bahwa komunikasi internal dan proses informal telah dilakukan jauh hari sebelum Kaesang diresmikan sebagai kader, sehingga partai merasa proses tersebut tetap sesuai dengan semangat internal organisasi meskipun tidak mengikuti mekanisme formal (Republika, 2023).

Dari sisi internal PSI, Ketua Umum sebelumnya, Giring Ganesha mengklaim bahwa usulan untuk menunjuk Kaesang sebagai ketua umum telah melalui pertimbangan panjang dan merupakan hasil aspirasi dari kader daerah (Kompas.id, 2023). Menurutnya, nama Kaesang sudah dibahas sejak tiga bulan sebelum deklarasi resmi, dan figur Kaesang dinilai memiliki daya tarik elektoral yang kuat bagi pemilih muda. Dalam berbagai pernyataannya, Giring juga menekankan bahwa penunjukan ini bukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, tetapi juga karena Kaesang dianggap memiliki visi yang sejalan dengan semangat PSI dalam membangun politik yang bersih dan inklusif (Antarnews.com, 2023).

Meskipun proses pengangkatan tersebut tidak melalui mekanisme kongres formal, PSI mengklaim bahwa langkah tersebut tetap sah secara internal dan diperlukan demi menyelamatkan partai dalam kontestasi elektoral. Dalam konteks ini, Koptarnas dijadikan sebagai forum kolektif untuk menyampaikan aspirasi kader dan menyepakati reorganisasi kepemimpinan, meskipun secara hukum internal tidak setara dengan kongres (Republika, 2023). Tindakan ini menunjukkan bagaimana partai politik di Indonesia melakukan penyelewengan prosedural demi kepentingan pragmatis dan strategi jangka pendek.

Di sisi lain, PSI menyatakan bahwa <sup>1</sup> **pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** merupakan langkah strategis **untuk** dapat memperkuat citra dan identitas partai di kalangan pemilih muda, terutama <sup>95</sup> Gen Z dan milenial, yang mendominasi pemilih dalam Pemilu

2024. Komposisi pemilih muda dalam pemilu nasional Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 ke 2024, khususnya pada kelompok generasi milenial (lahir 1981–1996) dan generasi Z (lahir 1997–2006). Pada Pemilu 2019, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah sekitar 192.866.254 orang, kelompok usia muda mendominasi hampir separuh dari populasi pemilih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Litbang Kompas, jumlah pemilih berusia 21–30 tahun tercatat sebanyak 42,84 juta orang, sedangkan usia 31–40 tahun sebanyak 43,41 juta orang, yang sebagian besar merupakan bagian dari generasi milenial dan Gen Z (Koran Sulindo, 2023). Jika ditambahkan dengan kelompok usia 17–20 tahun, maka secara keseluruhan pemilih dari generasi Z dan milenial pada Pemilu 2019 diperkirakan mencapai antara 70 hingga 80 juta orang, atau sekitar 36%–41% dari total pemilih. Angka ini menunjukkan dominasi kelompok muda yang signifikan dalam peta politik elektoral nasional.

Menyadari dominasi pemilih muda tersebut, PSI menyatakan bahwa pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat citra dan identitas partai di kalangan generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, yang secara kuantitatif mendominasi pemilih dalam Pemilu 2024. Strategi ini diposisikan sebagai upaya untuk menciptakan koneksi emosional dengan segmen pemilih muda melalui simbolisasi kepemimpinan yang dianggap relevan, populer, dan mewakili semangat zaman.

Dalam konteks ini, teori modal politik yang dikemukakan oleh Kimberly L. Casey digunakan untuk menganalisis berbagai modal yang dimiliki Kaesang dan dampaknya terhadap perolehan suara PSI. Modal lembaga, yang mencakup struktur dan organisasi partai, menjadi penting dalam mendukung keberhasilan strategi ini. PSI, sebagai partai yang mengklaim mewakili suara anak muda, perlu memastikan bahwa pengangkatan Kaesang

tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diiringi dengan penguatan struktur internal yang solid.

Teori modal politik Casey menjelaskan bahwa keberhasilan aktor politik ditentukan oleh modal yang dimilikinya, aktor politik yang mempunyai modal besar mempunyai peluang lebih besar memenangkan kontestasi. Modal personal Kaesang mencakup popularitasnya sebagai figur publik dan statusnya sebagai bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo. Popularitas ini memberikan akses kepada jaringan luas serta mempermudah penerimaan masyarakat terhadapnya. Namun, modal ini harus diimbangi dengan institusional berupa dukungan internal partai yang kuat dan strategi kampanye yang relevan untuk memastikan keberlanjutan dampak elektoral PSI di kalangan pemilih muda.

Dalam hal institusional, PSI menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa Kaesang tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi juga memiliki peran substansial dalam pengambilan keputusan partai. Penguatan struktur internal, termasuk penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan Gen Z dan milenial, menjadi prioritas utama. PSI harus membangun mekanisme internal yang transparan dan akuntabel untuk mendukung kepemimpinan Kaesang, sehingga dapat mengkonsolidasikan dukungan dari kader partai serta basis pemilih muda yang diincar.

Untuk memahami strategi yang digunakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara lebih mendalam, tidak cukup hanya dengan melihat keputusan politik dalam mengangkat Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum. Strategi tersebut sesungguhnya berakar pada pemanfaatan sumber daya yang melekat pada figur Kaesang, yang dalam teori modal politik dipahami sebagai bentuk kapital non-material yang mampu dikonversi menjadi kekuatan politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap modal politik yang dimiliki oleh Kaesang, yang mencakup berbagai dimensi seperti modal simbolik, sosial, ekonomi, budaya, hingga moral. Modal-modal inilah yang menjadi landasan

utama strategi personalisasi politik yang dijalankan PSI, yakni menjadikan figur publik sebagai representasi citra dan harapan partai. Dengan mengkaji modal politik tersebut, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana dan sejauh mana strategi pengangkatan Kaesang mampu memengaruhi perolehan suara PSI dalam kontestasi Pemilu 2024.

Modal <sup>5</sup> politik menurut Kimberly L. Casey mencakup tujuh modal politik, yaitu modal kelembagaan, modal sosial, modal manusia, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal budaya. Berikut modal politik yang mempengaruhi pemilihan Kaesang dan menjadi alasan pengangkatannya sebagai Ketua Umum PSI. Dalam perspektif elektoral, keberhasilan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan modal politiknya dan institusional PSI. Kombinasi ini tidak hanya akan meningkatkan perolehan PSI tetapi juga memperkuat posisinya <sup>24</sup> sebagai partai yang mampu bersaing dengan partai-partai mapan. Dengan strategi yang terencana dan berbasis data, PSI dapat memanfaatkan pengangkatan Kaesang untuk membangun identitas politik yang kuat di kalangan pemilih muda, sekaligus menjadi representasi nyata dari suara generasi muda.



Gambar 4 2 Modal Sosial Kaesang

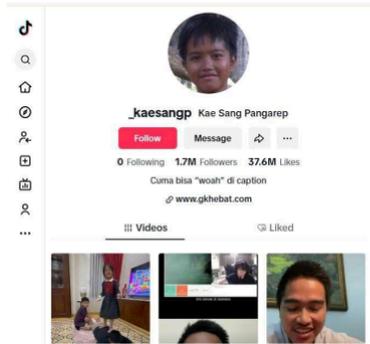
Sumber: Youtube Jerome Polin

Selanjutnya, modal sosial yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep sebagai figur public, dengan memanfaatkan popularitasnya, Kaesang dapat menjadi penghubung antara PSI dan kelompok pemilih muda, yang sering kali dianggap sebelah mata dari politik formal. Modal sosial ini tampak jelas dalam performa Kaesang di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Di Instagram, akun @kaesangp memiliki 4,2 juta pengikut, dengan rata-rata memperoleh 932 likes dan 42 komentar per unggahan. Meskipun *engagement rate*-nya terbilang rendah, yaitu sekitar 0,02%, jangkauan audiensnya tetap luas. Sebaliknya, performa digital Kaesang di TikTok jauh lebih signifikan. Akun @\_kaesangp mencatat 1,7 juta pengikut, dengan rata-rata 3,2 juta views dan 467 shares per unggahan, serta *engagement rate* sebesar 5,01% (HypeAuditor, 2024).



Gambar 4 3 Instagram @kaesangp

Sumber: Instagram.com/kaesangp



Gambar 4 4 Tiktok @\_kaesangp

Sumber: [tiktok.com/@\\_kaesangp](https://tiktok.com/@_kaesangp)

Menurut Ubedillah Badrun, S.Pd., M.Si, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas, sehingga PSI perlu memastikan bahwa citra Kaesang tidak bersifat sementara semata. Dalam konteks politik elektoral, popularitas seseorang sebagai figur publik seringkali hanya mencerminkan tingkat pengenalan masyarakat, bukan jaminan dukungan suara. Kaesang memang berhasil menarik perhatian luas sebagai anak Presiden yang dikenal dekat dengan generasi muda dan aktif di media sosial, tetapi daya tarik personal semacam ini belum tentu bertransformasi menjadi pilihan politik yang nyata di bilik suara. Elektabilitas memerlukan lebih dari sekadar citra; ia ditentukan oleh persepsi terhadap kapabilitas, konsistensi pesan politik, serta kesesuaian dengan harapan publik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun S.Pd., M.Si. akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, sebagai berikut:

*“gayanya mungkin memang mudah dimengerti gen z, tapi tidak bisa disimpulkan. Lihat aja dengan besaran jumlah pemilihnya. Suka tapi belum tentu memilih, jadi berbeda antara popularitas dan elektabilitas.”* (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024)

Namun demikian, efektivitas modal sosial Kaesang Pangarep di ranah media sosial tidak dapat serta-merta diukur dari angka pengikut (followers) atau tingkat interaksi digital semata. Menurut Ubedillah Badrun, hanya sekitar 30% dari pengikut Kaesang yang dapat dikategorikan sebagai pendukung organik, sementara sisanya kemungkinan besar merupakan audiens pasif atau bahkan akun non-organik yang tidak memiliki keterikatan emosional atau ideologis yang kuat. Dalam konteks ini, angka yang muncul di media sosial tidak selalu mencerminkan dukungan riil terhadap figur politik maupun partai yang diusungnya. Meskipun Kaesang mampu menguasai algoritma media sosial dan menghasilkan konten yang menarik perhatian publik, seperti terlihat dari tingginya jumlah penayangan atau jumlah share pada unggahannya, hal tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas PSI secara signifikan.

Lebih lanjut, Ubedillah menekankan bahwa perlu dilakukan pemisahan antara popularitas digital dengan preferensi politik yang konkret. Banyak dari pengikut media sosial mungkin hanya menyukai gaya komunikasi atau sisi personal dari seorang tokoh, tetapi belum tentu akan memilih partai yang diwakilinya dalam pemilu. Oleh karena itu, klaim bahwa pengangkatan Kaesang secara otomatis akan menaikkan suara PSI tidak dapat ditarik sebagai kesimpulan pasti tanpa data empiris yang mendalam. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun modal sosial berbasis media digital memiliki nilai strategis, ia tetap harus ditopang oleh struktur partai yang kuat, basis ideologis yang jelas, serta strategi komunikasi politik yang mampu mengonversi daya tarik personal menjadi dukungan elektoral yang nyata.

*"Followers-nya itu 30 persen yang organik. Kalau dia menguasai algoritma media sosial, dia punya pengaruh, tapi lihat juga dari konten dan viewers-nya. Tapi angka di media sosial itu bukan statistik yang bisa diandalkan. Apakah mereka benar-benar suka, apakah mereka memilih PSI, dan apakah memilih PSI karena Kaesang, itu tidak bisa langsung disimpulkan."*(Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).



Gambar 4 5 Modal Manusia Kaesang

Sumber: Kompas.com

Modal selanjutnya, yaitu Modal manusia merujuk pada kapasitas individu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kapabilitas intelektual yang dapat menunjang efektivitasnya sebagai aktor politik. Dalam hal ini, Kaesang Pangarep dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan modal manusianya secara optimal. Menurut pengamatan Jeirry Sumampouw, Kaesang terlihat belum cukup percaya diri untuk tampil sebagai representasi tunggal PSI dalam forum-forum penting. Ia jarang tampil sendiri di ruang publik tanpa didampingi elite partai lainnya, yang menunjukkan indikasi bahwa PSI sendiri masih meragukan kapasitas personalnya—terutama dalam hal kemampuan komunikasi politik, penguasaan isu, serta penjabaran gagasan strategis. Ketiadaan Kaesang dalam momen krusial seperti penyikapan terhadap hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa ia belum mampu memainkan peran sentral sebagai pemimpin politik yang membawa visi partai ke ruang publik.

Minimnya keterlibatan langsung Kaesang dalam menyampaikan gagasan atau arah kebijakan PSI di hadapan publik juga memperkuat asumsi bahwa modal manusia yang dimilikinya masih dalam tahap awal. Padahal, momen-momen pasca pemilu seperti itu bisa dimanfaatkan sebagai panggung

untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan, seperti menawarkan gagasan tentang arah PSI dalam Pilkada atau strategi konsolidasi internal partai. Ketidakhadiran tersebut bukan hanya melewatkan peluang strategis, tetapi juga menimbulkan keraguan di kalangan publik tentang seberapa jauh kemampuan Kaesang untuk menjalankan peran sebagai Ketua Umum secara substantif. Dalam konteks ini, pengembangan modal manusia menjadi sangat krusial agar keberadaan Kaesang di pucuk pimpinan PSI tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam membawa partai ke arah yang lebih mapan dan visioner.

*"jika kalian lihat Kaesang juga tidak pernah tampil sendiri di publik karena PSI juga ragu kemampuan personalnya, gagasan personalnya dia masih sangat minim karena itu jarang dia tampil sendiri di muka umum untuk mewakili PSI, salah satunya ketika PSI menyikapi hasil pemilu itu dia tidak tampil sendiri. Padahal momen itu bisa dia manfaatkan untuk mengeluarkan gagasan, misal gagasan dari dia untuk pilkada atau strategi apa yang ingin dilakukan PSI dalam pilkada."*(Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).

Jeirry Sumampouw menyatakan bahwa komunikasi publik Kaesang sebagian besar tampak diatur oleh tim PSI, bukan merupakan hasil refleksi atau respons pribadi yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa Kaesang lebih sering berperan sebagai representasi simbolik daripada aktor politik aktif yang memiliki otonomi berpikir dan bertindak. Dalam berbagai kesempatan strategis, termasuk respons terhadap isu nasional atau pernyataan politik penting, Kaesang cenderung absen atau memilih pendekatan yang terlalu ringan, bahkan komikal. Meskipun gaya santai ini sesuai dengan karakter generasi muda, ketidakhadiran gagasan substantif dalam komunikasi politiknya justru menimbulkan keraguan publik terhadap kapasitas kepemimpinannya.

Dalam perspektif modal manusia, seorang pemimpin politik idealnya memiliki kemampuan untuk terlibat aktif dalam diskursus publik, menyusun gagasan yang relevan dengan konteks sosial-politik, serta menunjukkan kapasitas intelektual dalam mengarahkan strategi partai. Namun, kapasitas tersebut tampaknya belum sepenuhnya dimiliki oleh Kaesang Pangarep.

Menurut Jeirry Sumampouw, kapasitas Kaesang sebagai pemimpin politik masih sangat minim, terutama dalam hal berkontribusi pada opini publik yang konstruktif. Meskipun Kaesang memiliki akses ke ruang publik dan dapat menjadi bagian dari percakapan nasional karena popularitasnya sebagai anak presiden, sejauh ini ia belum menunjukkan inisiatif atau gagasan yang bernilai strategis dan substansial.

Fenomena viral yang sering dikaitkan dengan Kaesang justru lebih banyak bersifat *gimmick* atau hal-hal remeh temeh yang tidak berkaitan langsung dengan wacana kebijakan atau arah politik yang signifikan. Padahal, sebagai Ketua Umum partai, ia seharusnya mampu menjadi *influencer* politik yang menyuarakan ide dan kebijakan partai ke tengah publik. Contohnya, dalam isu “Barisan Nasional”, yakni wacana pembentukan koalisi pendukung Prabowo di luar pemerintahan. Kaesang tidak tampil sebagai aktor utama. Gagasan tersebut justru disampaikan oleh elite PSI lainnya seperti Grace Natalie dan Jeffrie Geovanie. Hal ini memperlihatkan bahwa Kaesang belum berperan sebagai pemimpin gagasan yang bisa menginisiasi atau setidaknya menyuarakan kebijakan partai secara independen di ruang publik. Menurut Jeirry, ini mencerminkan kelemahan mendasar dari Kaesang sebagai figur politik, yakni ketiadaan atau keterbatasan dalam kemampuan menyusun dan menyampaikan gagasan yang dapat dikatakan penting dan relevan dalam dinamika politik nasional.

*“Kalau opini publik, mungkin persoalannya karena kapasitas dia sebagai pemimpin dalam politik itu belum ada. Saya masih meragukan kemampuannya untuk memimpin. Dalam hal opini publik, dia punya kapasitas untuk masuk ke percakapan ruang publik, tapi kalau lihat selama ini, dia tidak punya kemampuan untuk itu... Kalau memang ada yang viral dari dirinya itu bukan wacana konstruktif, tapi ‘remeh temeh’... dia belum pernah memunculkan ide yang menurut publik penting untuk diimplementasikan atau diperdebatkan.”*Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).



Gambar 4 6 Modal Ekonomi Kaesang

Sumber: CNBC Indonesia

Modal selanjutnya adalah modal ekonomi yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep, Modal ekonomi menjadi fondasi penting dalam struktur kekuatan politik Kaesang Pangarep, selaras dengan konsep modal politik yang dikemukakan oleh Casey (2008). Sebagai pengusaha muda, Kaesang membuktikan kapasitas ekonominya melalui portofolio usaha yang luas. Salah satu bisnis utamanya, *Sang Pisang*, diluncurkan pada 2017 dan berkembang pesat hingga memiliki 100 gerai di Indonesia per 2023 dengan lebih dari 1.500 karyawan, termasuk ekspansi ke Malaysia (Bisnis.com, 2024; IDN Times, 2024).

Selain portofolio bisnis kuliner, Kaesang Pangarep juga memperkuat modal ekonominya melalui peran strategis sebagai Komisaris RANS Entertainment, perusahaan media dan hiburan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kaesang diumumkan secara resmi menduduki posisi ini pada Oktober 2021 dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh pihak Emtex Group. Dalam wawancaranya, Kaesang menyatakan bahwa perannya adalah bagian dari pengembangan ekosistem digital dan hiburan kreatif RANS (Kompas TV, 2021). RANS sendiri merupakan perusahaan media yang memiliki pengaruh besar di platform digital, dengan lebih dari 21,9 juta subscriber YouTube dan lebih dari 4,6 miliar total views pada akhir tahun 2021, menjadikannya salah satu media digital dengan jangkauan terluas di Indonesia

(Detik Finance, 2021). Keterlibatan Kaesang dalam perusahaan sebesar ini tidak hanya menunjukkan kapasitas ekonominya, tetapi juga memperluas jangkauan pengaruhnya dalam lanskap media dan komunikasi digital yang strategis bagi perpolitikan modern.

Dalam wawancaranya, Prof. Ramlan Surbakti menekankan bahwa keberhasilan dalam dunia usaha tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kapabilitas seseorang dalam dunia politik. Menurutnya, politik memerlukan akumulasi pengalaman, pemahaman sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, serta rekam jejak yang memperlihatkan kapasitas kepemimpinan dalam arena publik. Hal ini menyoroti keterbatasan konversi modal ekonomi menjadi modal politik secara langsung, terutama dalam konteks demokrasi elektoral yang semakin kompleks. Meskipun Kaesang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang signifikan, baik melalui bisnis pribadi maupun jejaringnya di sektor swasta, hal itu belum cukup untuk membentuk persepsi publik yang kuat terhadap kapasitasnya sebagai pemimpin partai politik.

Lebih lanjut, Prof. Ramlan juga menyampaikan bahwa dalam politik, modal kepercayaan (*trust capital*) menjadi penentu utama dalam membangun legitimasi di mata konstituen. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun semata dari kekayaan atau popularitas, tetapi dari konsistensi, kredibilitas, serta partisipasi aktif dalam proses politik. Dalam hal ini, PSI yang mengusung Kaesang sebagai Ketua Umum menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa pengangkatan tersebut tidak semata berdasarkan kalkulasi elektoral yang bersifat pragmatis, melainkan disertai dengan agenda substantif yang mencerminkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang layak.

*“Politik itu berbeda dengan bisnis. Bisnis bisa sukses karena dikelola dengan modal dan strategi usaha, tapi politik memerlukan pengalaman, integritas, dan kepercayaan dari publik. Tanpa itu, seseorang akan sulit dipercaya memimpin, meskipun ia sukses di bidang ekonomi.”*(Wawancara Prof. Ramlan Surbakti, Jakarta, 17 Mei 2024).



Gambar 4 7 Modal Simbolik Kaesang

Sumber: Tempo.co

Berikutnya, terdapat modal simbolik yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep, sebagai putra seorang presiden, memberikan keuntungan strategis bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam membangun jaringan politik yang luas. Menurut Jeirry Sumampouw modal simbolik yang dimiliki Kaesang Pangarep tidak hanya berasal dari statusnya sebagai anak Presiden Joko Widodo, tetapi juga dari representasi nilai-nilai kekuasaan, kontinuitas politik, dan populisme modern yang diasosiasikan dengan figur ayahnya. Dalam konteks ini, kehadiran Kaesang di PSI membawa efek simbolik yang kuat yakni sebagai manifestasi dari kedekatan partai dengan lingkaran kekuasaan nasional. Fenomena ini memperkuat citra PSI sebagai partai muda yang memiliki “akses istimewa” ke pusat kekuasaan, walaupun secara struktural tidak berada dalam koalisi pemerintahan. Namun, seperti disampaikan oleh Jeirry Sumampouw, simbolisme ini tidak datang tanpa beban. Kaesang memang memiliki ketiga bentuk modal politik, modal personal, sosial, dan simbolik, tetapi pada tingkat simbolik, Kaesang masih bergantung pada pengaruh dan dukungan ayahnya secara langsung, termasuk *endorsement* politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi secara terbuka.

Lebih lanjut, Jeirry juga menyoroti bahwa waktu pengangkatan Kaesang dianggap terlalu dekat dengan masa kampanye, sehingga strategi

simbolik ini tidak dapat dimaksimalkan sepenuhnya. Meski demikian, menurut pengamatannya, peningkatan suara PSI tetap tampak di beberapa survei, yang diduga karena efek gabungan dari Kaesang dan Jokowi. Namun, kritik juga muncul dari aspek penggunaan jaringan birokrasi negara yang diduga dimobilisasi untuk menyokong citra PSI. Jeirry mencontohkan penyebaran baliho Kaesang yang merata hingga ke daerah terpencil, termasuk di Pulau Buru, Sulawesi Utara, dan Bali. Menurutnya, hal ini tidak mencerminkan kekuatan jaringan partai secara organik karena pada kenyataannya, PSI tidak memiliki infrastruktur partai yang kuat di desa-desa. Keberadaan baliho tersebut justru mengindikasikan penggunaan jaringan non-partai, seperti aparat negara, untuk kampanye yang secara simbolik memperkuat asosiasi PSI dengan kekuasaan, namun juga memicu kritik terkait etika demokrasi.

*“Kaesang punya ketiganya memang pada modal ketiga Kaesang masih ‘nebeng’ dari bapanya, apalagi bapanya endorse terus... Tapi menghadirkan Kaesang tidak dapat membuat suara PSI menjadi 4%, pertama karena dia terkena stigma politik dinasti... jaringan partainya di desa masih lemah tetapi ini ada balihnya sampai di pelosok hingga di Pulau Buru... katanya yang memasang itu polisi”*(Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).

Di sisi lain, Prof. Ramlan Surbakti berpendapat keberadaan Kaesang juga membawa potensi risiko terkait stigma politik dinasti. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang beredar, tampaknya PSI mencoba memanfaatkan hubungan keluarga Kaesang dengan Presiden Jokowi sebagai strategi politik. Hal ini mencerminkan dinamika dinasti politik yang bertujuan untuk memperpanjang pengaruh Jokowi setelah masa jabatannya selesai. Strategi ini juga dimaksudkan untuk membantu PSI mencapai ambang batas parlemen dengan menggunakan citra keluarga presiden sebagai daya tarik elektoral. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada penerimaan publik terhadap dinasti politik, yang dalam beberapa kasus justru dapat menimbulkan resistensi, terutama dari kalangan pemilih yang mengedepankan demokrasi yang meritokratis.

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Prof. Ramlan Surbakti yang menilai bahwa langkah PSI dalam mengangkat Kaesang lebih banyak mengandalkan modal simbolik ketimbang substansi politik. Dalam konteks ini, Kaesang bukan hanya dilihat sebagai individu, tetapi sebagai representasi simbolik dari kekuasaan yang sedang atau pernah berkuasa. Hal tersebut menjelaskan bagaimana kehadiran Kaesang digunakan sebagai instrumen politik untuk mendulang suara dari basis pemilih Jokowi. Namun, strategi semacam ini rentan terhadap kritik publik yang semakin sadar akan pentingnya kompetensi dan integritas dalam politik, bukan sekadar afiliasi keluarga atau popularitas personal.

Prof. Ramlan juga menegaskan bahwa politik tidak semestinya dipandang sebagai perluasan dari hubungan kekeluargaan, karena itu akan memperlemah semangat demokrasi dan meritokrasi. Menurutnya, praktik politik dinasti, meskipun sah secara hukum, sering kali mencederai kepercayaan publik karena mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga. Dalam kasus Kaesang, meskipun ia membawa modal simbolik sebagai anak presiden, hal tersebut belum tentu menjamin kepercayaan publik tanpa dukungan kualitas kepemimpinan dan visi politik yang jelas. Ketergantungan PSI pada simbol keluarga justru dikhawatirkan akan memperkuat citra partai yang oportunistik dan tidak berakar pada kaderisasi maupun ideologisasi yang kuat.

*“Berdasarkan pengamatan dan informasi yang beredar, tampaknya PSI mencoba memanfaatkan hubungan keluarga Kaesang dengan Presiden Jokowi sebagai strategi politik. Hal ini mencerminkan dinamika dinasti politik yang bertujuan untuk memperpanjang pengaruh Jokowi setelah masa jabatannya selesai. Strategi ini juga dimaksudkan untuk membantu PSI mencapai ambang batas parlemen dengan menggunakan citra keluarga presiden sebagai daya tarik elektoral. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada penerimaan publik terhadap dinasti politik.” (Wawancara Prof. Ramlan Surbakti, Jakarta 17 Mei 2024)*



Gambar 4 8 Modal Budaya Kaesang

Sumber: Kompas.com

Selanjutnya adalah Modal budaya yang dimiliki Kaesang. Menurut Andy Budiman Alasan pengangkatan Kaesang menjadi Ketua Umum PSI tercermin dalam gaya komunikasi dan ekspresi politik yang dekat dengan karakteristik generasi muda. Sebagai figur yang memang berasal dari generasi milenial, Kaesang tampil dengan cara yang sangat berbeda dari politisi senior pada umumnya. Ia tidak menampilkan diri sebagai pribadi yang kaku atau birokratis, melainkan lebih santai, informal, dan akrab dalam pendekatannya terutama di ruang-ruang digital seperti TikTok dan Instagram. Dalam berbagai kontennya, Kaesang sering kali terlibat langsung dengan anak-anak muda melalui dialog santai, guyonan khas anak muda, dan bahasa yang ringan, yang menunjukkan bahwa ia memahami cara komunikasi generasi sekarang yang cenderung horizontal dan tidak hierarkis.

Pendekatan ini dinilai Andy Budiman konsisten dengan *branding* PSI sebagai partai anak muda yang ingin tampil segar dan berbeda dari partai politik konvensional yang cenderung formal dan kaku. Kaesang, dengan keseharian dan gaya komunikasinya, membawa nuansa baru yang dianggap lebih representatif terhadap aspirasi generasi muda. Hal ini secara tidak langsung menjadi bentuk modal budaya yang digunakan PSI untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih muda. Budaya keterbukaan, informalitas, serta gaya komunikasi yang lebih partisipatif menjadi nilai-nilai yang coba dibawa Kaesang ke dalam ruang politik lewat peran simboliknya.

<sup>4</sup> Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, “*PSI sebagai partai yang dipersepsikan atau membranding diri sebagai partai anak muda dengan kepemimpinan Mas Kaesang. Pertama ya, jadi Ketua Umumnya sendiri muda. Kemudian dalam komunikasi politik sehari-hari, Mas Kaesang itu memperlihatkan sikap yang khas anak muda. Beda dengan mungkin partai-partai yang lebih senior, yang sifatnya sangat birokratis, yang sifatnya sangat formil, yang pendekatannya sangat pendekatan birokratis. Kalau lihat juga banyak konten-konten Mas Kaesang kan ngobrol santai tanpa jarak dengan anak-anak muda, gitu, di TikTok. Itu memang kesehariannya Mas Kaesang.*”

Pernyataan terkait gaya komunikasi Kaesang disampaikan oleh Andy Budiman selaku Wakil Ketua Umum dalam wawancara, sebagai berikut;

*PSI sebagai partai yang dipersepsikan atau membranding diri sebagai partai anak muda dengan kepemimpinan Mas Kaesang. Pertama ya, jadi Ketua Umumnya sendiri muda. Kemudian dalam komunikasi politik sehari-hari, Mas Kaesang itu memperlihatkan sikap yang khas anak muda. Beda dengan mungkin partai-partai yang lebih senior, yang sifatnya sangat birokratis, yang sifatnya sangat formil, yang pendekatannya sangat pendekatan birokratis. Kalau lihat juga banyak konten-konten Mas Kaesang kan ngobrol santai tanpa jarak dengan anak-anak muda, gitu, di TikTok. Itu memang kesehariannya Mas Kaesang.* (Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024).

Namun demikian, pandangan berbeda dikemukakan oleh Jeirry Sumampouw yang menilai bahwa bentuk komunikasi politik yang selama ini tampak justru lebih banyak diproduksi oleh lembaga (PSI) ketimbang muncul secara otentik dari pribadi Kaesang. Menurutnya, keberadaan baliho atau konten politik yang menampilkan wajah dan nama Kaesang sebenarnya merupakan strategi institusional dari partai untuk memanfaatkan popularitasnya, bukan bentuk ekspresi politik personal Kaesang.

"Hal itu lebih ke PSI-nya, artinya yang membuat itu PSI bukan Kaesang. Jadi kalau komunikasi politik itu ada dua, ada yang diproduksi oleh lembaganya dengan memasang muka Kaesang di dalam balihnya karena ia populer dan ada Jokowi di belakangnya, dan diksi yang ada di dalamnya itu diproduksi oleh lembaga. Lalu ada komunikasi politik yang dari Kaesangnya sendiri—bagian ini yang belum kita lihat dari Kaesang. Tentu saja ini berkaitan dengan jam terbang dan kapasitas politik personalnya untuk melahirkan gagasan. Dia sudah punya modal popularitas, tetapi tidak punya gagasan sendiri, sehingga komunikasinya itu lebih banyak diproduksi oleh lembaga. Apalagi kalau sudah masuk dalam bentuk baliho, itu sudah pasti diproduksi oleh lembaga, apalagi diksi yang digunakan tidak pernah kita dengar sebelumnya." (Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).

Jeirry juga menambahkan bahwa ketidakhadiran Kaesang dalam berbagai momen penting PSI, seperti ketika merespons hasil Pemilu, memperkuat kesan bahwa partai sendiri masih meragukan kapasitas personalnya.

"Menurut saya, jika kalian lihat Kaesang juga tidak pernah tampil sendiri di publik karena PSI juga ragu kemampuan personalnya, gagasan personalnya dia masih sangat minim karena itu jarang dia tampil sendiri di muka umum untuk mewakili PSI, salah satunya ketika PSI menyikapi hasil pemilu itu dia tidak tampil sendiri. Padahal momen itu bisa dia manfaatkan untuk mengeluarkan gagasan, misal gagasan dari dia untuk pilkada atau strategi apa yang ingin dilakukan PSI dalam pilkada." (Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).

Lebih lanjut, PSI perlu memastikan bahwa nilai-nilai yang diusung oleh Kaesang tercermin dalam program dan kebijakan partai. Hal ini mencakup penciptaan inisiatif yang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan generasi muda, seperti program pendidikan, kewirausahaan, dan partisipasi politik. Dengan cara ini, PSI tidak hanya memperkuat citra Kaesang sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga membangun legitimasi politik yang lebih kokoh di mata publik. Oleh karena itu, pengelolaan modal budaya yang efektif akan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi politik PSI ke depan.

Kritik lebih lanjut dari Jeirry Sumampouw menyoroti bahwa komunikasi politik Kaesang masih belum berkembang secara mandiri dan cenderung melekat pada bayang-bayang ayahnya, Presiden Jokowi. PSI secara konsisten membangun citra Kaesang sebagai representasi langsung dari Jokowi, bukan sebagai individu dengan karakter dan narasi politik sendiri.

Strategi ini memang memberi keuntungan dalam jangka pendek dengan menggaet perhatian publik melalui kedekatannya dengan figur nasional, namun juga menciptakan keterbatasan yang signifikan. Ketika Kaesang tidak mampu tampil dengan gagasan maupun posisi politik yang jelas, maka figur publiknya hanya berfungsi sebagai perpanjangan simbolik dari sosok Jokowi.

Jeirry juga mencatat bahwa keberadaan Kaesang dalam PSI terkesan terburu-buru atau “karbitan”, sehingga partai pun tampak ragu untuk memberi ruang ekspresi politik yang lebih luas kepadanya. Minimnya penampilan Kaesang dalam format wawancara atau diskusi publik, serta kecenderungan PSI menempatkan tokoh-tokoh seperti Grace Natalie sebagai wajah utama partai, memperkuat kesan bahwa PSI belum sepenuhnya percaya terhadap kapasitas komunikatif Kaesang. Padahal, menurut Jeirry, dibandingkan Gibran, Kaesang memiliki potensi komunikasi yang lebih baik dengan artikulasi yang relatif jelas. Sayangnya, potensi ini belum dapat berkembang maksimal karena keterbatasan pengalaman serta ketidaksiapan partai untuk mendorong Kaesang tampil sebagai pribadi politik independen.

*“Kalau yang personal memang belum maksimal, yang partai brandingnya PSI ini memang menggunakan figurnya Kaesang dan selalu dikaitkan dengan Jokowi. Komunikasi Kaesang dengan PSI selalu membangun image Kaesang ini adalah Jokowi, dia belum bisa berdiri sendiri sebagai Kaesang. Itu menjadi salah satu kelemahan komunikasi politiknya. [...] Salah satu kelemahan Kaesang juga adalah dia karbitan, dengan dia diambil secara tiba-tiba oleh PSI, PSI sendiri kurang menampilkan Kaesang. Misal ada wawancara, dia jarang ditampilkan sendiri dan lebih sering berada di bawah bayang-bayang Grace.” (Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).*



Gambar 4 9 Modal Moral Kaesang

Sumber: CNBC Indonesia

Modal ketujuh, yaitu Modal moral yang merupakan fondasi legitimasi politik yang tidak kasat mata, tetapi sangat menentukan keberlanjutan kepercayaan publik terhadap aktor maupun institusi politik. Modal moral merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan politik karena mencerminkan nilai, etika, dan integritas yang menjadi landasan kepercayaan publik. Dalam konteks <sup>16</sup>pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), muncul berbagai kritik dari akademisi Ubedillah Badrun S.Pd., M.Si. yang menilai bahwa proses tersebut sarat dengan persoalan etis dan moral. Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada figur Kaesang, tetapi juga kepada institusi partai yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip keadilan politik dan mekanisme demokrasi internal

Menurut Ubedillah Badrun, pengangkatan Kaesang telah merusak nilai-nilai dan etika dalam politik. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut mengaburkan konstitusi partai dan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi

para kader yang telah lebih dahulu membangun PSI dengan loyalitas dan konsistensi. Ketika fungsi rekrutmen politik tidak dijalankan secara objektif dan berbasis pada kapasitas serta pengalaman, maka hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi internal dan menimbulkan demoralisasi di kalangan kader.

Di sisi lain, keputusan PSI untuk mengangkat Kaesang secara tiba-tiba juga menimbulkan persepsi bahwa partai tersebut lebih mengedepankan kalkulasi elektoral jangka pendek dibanding proses kaderisasi yang berkelanjutan. Kritik moral semakin menguat karena pemilihan Kaesang dianggap tidak melalui proses seleksi terbuka atau berbasis meritokrasi. Hal ini mencerminkan kegagalan partai dalam mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kampanyekan, yakni keterbukaan, partisipasi, dan regenerasi yang sehat.

Selain itu, Ubedillah juga menyoroti bahwa pengangkatan Kaesang mengaburkan nilai kepublikan dan memberi kesan bahwa politik adalah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan melalui koneksi dan popularitas semata. Jika figur seperti Kaesang dianggap sebagai representasi generasi muda atau generasi Z dalam politik, maka hal ini menurutnya justru memberikan contoh buruk bagi anak muda yang ingin terlibat secara aktif dan bermakna dalam dunia politik. Persepsi ini menciptakan polarisasi moral antara kepentingan elektoral partai dan etika publik.

Lebih jauh, Ubedillah Badrun S.Pd., M.Si. dalam wawancara menyatakan bahwa kehadiran Kaesang:

*“merusak nilai-nilai dan hal etik atau etis dalam politik. Karena mengaburkan konstitusi partai. Karena menimbulkan ketidakadilan. Mengabaikan loyalitas kader lain. Mengaburkan demokrasi dan keadilan politik. Fungsi rekrutmen tidak berjalan objektif. Merusak nilai kepublikan, mengampangkan nilai. Jika dianggap representasi gen z berarti gen z sangat buruk nilainya”.* (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Praktik semacam ini juga mengikis prinsip demokrasi internal dan keadilan politik, karena proses rekrutmen menjadi tidak transparan dan cenderung elitis. Lebih jauh, hal ini mencederai nilai-nilai kepublikan dan memudarkan batas antara strategi politik dengan integritas nilai. Jika sosok seperti Kaesang dijadikan representasi generasi muda hanya karena popularitasnya, maka muncul risiko pelabelan negatif terhadap karakter Gen Z, seolah-olah generasi ini identik dengan kekuasaan instan, pragmatisme, dan ketidaksungguhan dalam politik.

Dalam analisis lebih lanjut, pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dapat dilihat sebagai upaya untuk merespons perubahan paradigma politik di Indonesia dari PSI. Masyarakat yang jenuh dengan gaya politik formal dan birokratis mengharapkan sosok yang lebih dekat dengan mereka. Kaesang, dengan pendekatan komunikasinya yang informal dan gaya hidup yang relevan dengan anak muda, diharapkan dapat membawa angin segar bagi PSI dan menarik perhatian pemilih muda.

Dengan demikian, akumulasi modal-modal tersebut membentuk suatu dinamika kompleks dalam strategi PSI. Modal yang dimiliki Kaesang memang menjanjikan dari sisi elektabilitas, namun juga menimbulkan berbagai kritik dan resistensi yang berpotensi menimbulkan kontraproduktivitas terhadap citra partai itu sendiri. Hal ini penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam sub bab berikutnya, yaitu mengenai implikasi pengangkatan Kaesang terhadap perolehan suara PSI dalam Pemilu 2024. Modal politik yang dimilikinya menjadi instrumen yang digunakan oleh PSI untuk memperkuat daya tarik elektoral, khususnya di kalangan pemilih muda. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas secara spesifik implikasi dari strategi pengangkatan Kaesang terhadap tingkat elektabilitas PSI.

#### **4.4. Implikasi Politik Pengangkatan Kaesang Terhadap Perolehan Suara PSI pada Pemilu 2024**

##### **4.4.1. Implikasi Politik Terhadap Internal PSI**

Keputusan pengangkatan Kaesang tidak hanya mencerminkan dukungan dari Jokowi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi PSI untuk meningkatkan daya tarik partai di kalangan pemilih muda. Visi PSI yang mengedepankan partisipasi anak muda dalam politik sejalan dengan kehadiran Kaesang sebagai figur yang muda dan inspiratif. Namun, pengangkatan ini juga menuai kritik terkait proses kaderisasi di PSI, serta memunculkan diskusi mengenai potensi dinasti politik dalam konteks keberlanjutan kekuasaan keluarga Jokowi. PSI dinilai mengambil langkah pragmatis untuk dalam upaya bersaing secara elektoral untuk mendapatkan suara dalam pemilu 2024. Pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Jeirry Sumampouw selaku pengamat politik, yaitu

*“Kalau dalam konteks pemilu kemarin kehadiran PSI dan Kaesang menurut saya itu lebih negatif dalam konteks demokrasi kita, karena Kaesang ini orang baru dan sulit membayangkan Kaesang menjadi ketua umum PSI tanpa Jokowi sehingga kehadiran Kaesang menjadi negatif dalam demokrasi. Pertama, jika kita bicara mengenai kaderisasi partai dalam merekrut Kaesang terlihat jelas itu kepentingan politik bukan kepentingan demokrasi, langkah yang diambil PSI sangat pragmatis sekali dengan mengabaikan proses kaderisasi di internal partai dengan mengangkat Kaesang yang baru dua hari menjadi anggota partai. Kedua, isu yang melekat dengan Kaesang adalah politik dinasti jadi kehadiran Kaesang dimaknai sebagai upaya membuat demokrasi kita semakin menurun karena makin memperkuat dinasti politik keluarga Jokowi. Ketiga, pragmatis PSI sangat terlihat dengan mengangkat Kaesang karena kepentingan politik elektoral. ” (Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta 27 Maret 2024).*

Pandangan Jeirry Sumampouw memberikan penekanan serius terhadap konsekuensi politik internal yang ditimbulkan dari pengangkatan Kaesang Pangarep. Menurutnya, proses pengangkatan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi internal partai politik yang ideal. Hal ini dikarenakan Kaesang diangkat sebagai Ketua Umum hanya dua hari setelah resmi menjadi anggota PSI. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan

keuntungan elektoral jangka pendek dibanding membangun tradisi kaderisasi yang sehat dan berkelanjutan. Proses tersebut dinilai menyalahi tata nilai organisasi politik yang seharusnya menghargai loyalitas dan kompetensi kader yang telah lama membangun partai dari bawah.

Jeirry juga menilai bahwa keberadaan Kaesang sebagai Ketua Umum tak dapat dilepaskan dari bayang-bayang pengaruh Presiden Joko Widodo. PSI dianggap tidak sungguh-sungguh mempersiapkan figur Kaesang secara independen dan otonom, melainkan memanfaatkan hubungan darahnya dengan Jokowi sebagai alat politik. Hal ini menjadi problematik karena memunculkan citra bahwa jabatan penting dalam partai bisa diperoleh bukan karena kapasitas dan integritas personal, melainkan karena relasi kekuasaan.

Hal sejalan turut disampaikan Andy Budiman sebagai bagian dari internal PSI mencerminkan keyakinan partai terhadap kekuatan simbolik dan elektoral yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep. Menurutnya, posisi Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo memberikan keuntungan politis yang tidak bisa dihindari. Jokowi sebagai presiden dua periode yang memperoleh tingkat kepuasan publik sangat tinggi, yakni berkisar antara 75–85% saat meninggalkan jabatannya, dianggap sebagai simbol kekuatan politik nasional. Popularitas tersebut secara otomatis mengalir ke Kaesang dalam bentuk persepsi publik yang positif, menjadikannya figur yang memiliki daya tarik elektoral signifikan.

*“Jadi sekali lagi kita tidak bisa dipungkiri bahwa Mas Kaesang sebagai putra bungsu dari Presiden Joko Widodo punya magnet tersendiri ya, karena Pak Jokowi sendiri adalah presiden yang dicintai oleh masyarakat. Hampir semua lembaga survei bahkan ketika Pak Jokowi meninggalkan jabatan sebagai presiden itu, approval rating dukungan masyarakat itu ada di kisaran 75-85% Kombinasi di antara hal-hal tadi memperkuat modal politik Mas Kaesang untuk terjun ke politik dan memimpin PSI.”*  
(Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024)

Selain itu, Kaesang dinilai memiliki jaringan sosial yang kuat terutama di kalangan anak muda. Sebagai bagian dari generasi muda dan aktif di ruang

digital, Kaesang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan gaya yang lebih sesuai dengan karakter pemilih <sup>60</sup> milenial dan Gen Z. Kelompok ini merupakan segmen pemilih terbesar dalam Pemilu 2024, sehingga kehadiran Kaesang dianggap sebagai upaya strategis PSI untuk menyasar ceruk elektoral yang sangat potensial. Dalam pandangan Andy Budiman, kombinasi antara figur presiden yang dicintai dan personalitas Kaesang yang dekat dengan dunia anak muda menjadi landasan penting dalam strategi politik PSI menjelang Pemilu.

Lebih lanjut, Andy Budiman menegaskan bahwa <sup>1</sup> pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI harus dilihat dalam kerangka strategi elektoral partai. Menurutnya, politik adalah ruang yang sangat dinamis, dan partai politik harus responsif terhadap kebutuhan untuk memperluas basis dukungan publik. Dalam hal ini, Kaesang dipandang sebagai figur yang memiliki daya tarik tersendiri, terutama di kalangan generasi muda, yang secara demografis merupakan segmen pemilih terbesar pada Pemilu 2024. Dengan citra positif sebagai anak Presiden Jokowi yang disukai publik, Kaesang dianggap mampu menjadi simbol baru yang mampu merepresentasikan semangat perubahan dan harapan baru di tengah kejenuhan masyarakat terhadap elit politik lama.

Berdasarkan data survei internal dan eksternal yang dikutip Andy, Kaesang menunjukkan elektabilitas yang cukup tinggi untuk tokoh muda seusianya, yakni saat masih berusia 29 tahun. Keunggulan ini menjadi salah satu alasan kuat bagi PSI untuk memposisikannya sebagai ujung tombak kampanye partai. Dalam perspektif PSI, langkah ini tidak hanya strategis dari segi pencitraan, namun juga dari sisi mobilisasi pemilih yang mungkin selama ini tidak memiliki kedekatan ideologis dengan partai politik manapun, terutama dari kalangan Gen Z dan milenial.

*“Tapi sekali lagi di dalam politik itu ada kebutuhan partai untuk meraih dukungan masyarakat yang lebih luas, ada strategi elektoral. Nah dalam konteks itulah harus*

dilihat pengangkatan Mas Kaesang itu... Karena Mas Kaesang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, disukai masyarakat, dan dalam berbagai survei juga, tingkat elektabilitasnya dibandingkan para tokoh politik nasional itu sudah tinggi untuk seorang anak muda yang umurnya 29 tahun ketika itu..” (Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024)

Dalam pandangan Ubedillah Badrun,<sup>101</sup> Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI tidak hanya berdampak pada wajah luar partai secara elektoral, tetapi juga membawa dampak besar terhadap dinamika internal, khususnya dalam aspek revitalisasi dan restrukturisasi kepemimpinan partai. Perubahan struktur partai ini menandai fase baru bagi PSI dalam upayanya untuk melakukan regenerasi, meremajakan wajah politik, dan sekaligus merekonstruksi ulang basis kekuatannya. Restrukturisasi ini menunjukkan adanya pergeseran arah organisasi yang sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik Kaesang sebagai anak Presiden Joko Widodo. Hal ini turut mendorong munculnya keyakinan kuat di internal PSI bahwa keterlibatan Jokowi meskipun tidak secara formal telah memberi daya tarik tersendiri bagi berbagai tokoh untuk bergabung.

“Cukup ada pengaruh karena merubah pengurus partai, dari yang penyanyi jadi dewan pembina, masuknya Kaesang merubah struktur PSI dan karena Kaesang anak Jokowi, tokoh-tokoh yang mendulang suara ditarik ke PSI, seperti Ade Armando (akademisi dan pakar komunikasi) sampai jadi seaneh itu, karena keyakinan hadirnya Jokowi di belakang PSI. Helmi Yahya (raja kuis) masuk ke PSI, Irma Hutabarat (pakar hukum) sampai masuk PSI. Dapat menarik tokoh terdidik masuk PSI, karena keyakinan dan meyakini hadirnya Jokowi”. (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Menurut Ubedillah Badrun fenomena ini menunjukkan bahwa PSI sedang melakukan revitalisasi dengan cara instan, yaitu mengganti wajah partai dengan figur-figur publik yang dianggap punya magnet elektoral dan legitimasi profesional. Strategi ini dapat dinilai sebagai upaya memperluas jangkauan politik PSI dengan menarik tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang ke dalam struktur partai, baik sebagai pengurus, juru bicara, maupun representasi elite partai di ruang publik.

Namun, revitalisasi ini juga menyiratkan risiko proses regenerasi yang bersifat akomodatif dan oportunistik dapat menciptakan ketimpangan antara loyalitas kader lama dan kekuatan baru yang dibawa oleh tokoh-tokoh eksternal. Restrukturisasi partai bukan hanya soal mengganti posisi formal, tetapi juga menyusun ulang budaya organisasi dan basis kepercayaan kader terhadap arah partai ke depan.

Di sisi lain, Ubedillah Badrun menilai bahwa modal politik yang dimiliki Kaesang tidak hanya terbatas pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi lebih dominan pada modal kekuasaan sebagai anak Presiden. Hal ini menjadi dasar salah satu implikasi penting dari pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI adalah terjadinya pergeseran struktur internal partai yang berkaitan erat dengan pola patronase kekuasaan. Menurutnya, modal tertinggi yang dimiliki Kaesang adalah statusnya sebagai anak penguasa (presiden) dan akses terhadap modal finansial. Modal inilah yang dinilai telah memudahkan Kaesang untuk "menaklukkan" PSI dan menempati posisi tertinggi di partai tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap konsistensi PSI dalam menjalankan mekanisme organisasi yang demokratis dan meritokratis sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai.

Ubedillah menyampaikan bahwa dalam aturan internal partai disebutkan bahwa pengurus pusat seharusnya adalah kader yang telah melalui proses kaderisasi. Namun dalam kasus Kaesang, prosedur tersebut tampaknya diabaikan. Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan teori patronase dan konsep klienelisme politik. Dalam pandangannya, PSI telah berubah menjadi partai klien dari Presiden Jokowi dan Kaesang, di mana pengaruh elite di atas secara otomatis menentukan arah dan posisi kader di bawah.

Menurutnya, modal tertinggi yang dimiliki Kaesang adalah statusnya sebagai anak penguasa (presiden) dan akses terhadap modal finansial. Modal inilah yang dinilai telah memudahkan Kaesang untuk "menaklukkan" PSI dan menempati posisi tertinggi di partai tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan

serius terhadap konsistensi PSI dalam menjalankan mekanisme organisasi yang demokratis dan meritokratis sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai.

Ubedillah berpendapat bahwa dalam aturan internal partai disebutkan bahwa pengurus pusat seharusnya adalah kader yang telah melalui proses kaderisasi. Namun dalam kasus Kaesang, prosedur tersebut tampaknya diabaikan. Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan teori patronase dan konsep klienelisme politik. Dalam pandangannya, PSI telah berubah menjadi partai klien dari Presiden Jokowi dan Kaesang, di mana pengaruh elite di atas secara otomatis menentukan arah dan posisi kader di bawah.

*“Teori kapital, modal finansial, sosial, budaya. Tapi lebih ke modal finansial, modal keluarga presiden (penguasa), modal kultural dan sosial standar. Modal tertinggi anak presiden dan finansial, memudahkan menaklukan PSI. tidak sesuai adart pasal 17 18, bisa jadi pengurus pusat harus lulus kaderisasi, nichol Machiavelli, mengabaikan etik dan politik untuk mendapatkan kekuasaan, karena pengaruh ayahnya. Dinasti. Psi partai Jokowi. Besar pengaruh kepada PSI karena uang dan kekuasaan, pola patronase, siapa yang diatas punya pengaruh bawahnya akan ikut, psi klien Jokowi dan kaesang. Bertentang dengan etik dan ad/art partainya.”.* (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Fenomena ini menciptakan tantangan serius bagi PSI untuk membuktikan bahwa mereka tetap merupakan partai yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan keadilan politik sebagaimana yang mereka gemborkan sejak awal pendirian partai. Jika tidak ada upaya penguatan kelembagaan partai dan penerapan prinsip meritokrasi secara konsisten, maka risiko terjadinya kerapuhan internal dan kehilangan basis kepercayaan publik akan semakin besar.

#### 4.4.2. Implikasi Faksional dan Konflik Internal PSI

Namun, <sup>16</sup>pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menyertainya. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah dinamika internal partai yang dapat timbul akibat ketidaksetaraan akses antar kader. Salah satu indikator paling nyata dari perubahan ini adalah munculnya ketegangan antara kader lama dan kelompok baru yang diidentikkan dengan “gerbong Jokowi.” Dalam wawancara dengan kader PSI, Danu Wintoro secara gamblang mengungkapkan adanya friksi yang tidak bisa dihindari akibat masuknya Kaesang beserta lingkaran politiknya ke dalam tubuh partai. Menurutnya, langkah partai yang mengakomodasi kekuatan eksternal ini secara tidak langsung mengorbankan loyalitas dan pengabdian kader-kader lama yang telah membangun PSI sejak awal.

*“Muncul gerbong Jokowi, dengan mengorbankan loyalitas kader lain. Tentu ada konflik internal”* (Wawancara Danu Wintoro, Jakarta 23 Februari 2024).

Pernyataan ini mencerminkan adanya gejala faksionalisasi internal, di mana partai secara implisit terbagi menjadi dua kubu: kader historis yang dibentuk atas dasar ideologi dan kesetiaan jangka panjang terhadap partai, serta kelompok baru yang hadir melalui jalur pragmatis sebagai bagian dari strategi elektoral. Faksionalisasi ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi menjurus pada ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan dan distribusi posisi strategis dalam struktur partai.

Ketidaksetaraan juga timbul dari modal lain yang dimiliki oleh Kaesang, yaitu modal simbolik sebagai putra presiden membuatnya memiliki *privilege* lebih dibandingkan dengan kader PSI yang lain. Diri Kaesang tidak terlepas dari bayang-bayang ayahnya Jokowi yang dianggap memiliki pengaruh besar serta jaringan luas sehingga bisa memanfaatkan pengaruhnya dan

jaringan untuk makin memperbesar kekuasaan dan pengaruh dari Partai Solidaritas Indonesia.

Prof. Ramlan Surbakti dalam wawancaranya menyatakan Implikasi ini semakin kuat ketika struktur partai berubah secara drastis pasca pengangkatan Kaesang. Munculnya figur-figur baru yang sebelumnya tidak memiliki sejarah perjuangan bersama PSI, namun langsung mengisi posisi-posisi penting, menimbulkan persepsi bahwa meritokrasi dan kaderisasi yang selama ini diklaim oleh PSI telah tergantikan oleh pendekatan transaksional dan elektoral. Ketimpangan antara loyalitas historis dan loyalitas elektoral ini menjadi sumber utama konflik berkepanjangan yang, jika tidak dikelola secara bijak, berpotensi menggerus kohesi internal partai dalam jangka panjang. Ketika proses kaderisasi yang seharusnya berbasis meritokrasi dilewati begitu saja oleh pengangkatan figur eksternal secara instan, maka implikasi struktural yang muncul adalah melemahnya kepercayaan kader terhadap keadilan sistem internal partai.

*“Dalam konteks PSI, terdapat posisi ketidaksetaraan akses di antara berbagai kader partai. Beberapa kader mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya politik dan dukungan dibandingkan yang lain, yang dapat mempengaruhi strategi pengangkatan Kaesang. Ketidaksetaraan akses di antara kader PSI perlu diperhitungkan dalam strategi pengangkatan Kaesang. PSI harus merumuskan kembali identitas dan strategi untuk menarik dukungan dari berbagai kalangan. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk kader yang kurang beruntung. PSI harus memperjelas identitas dan nilai-nilai partai agar dapat menarik dukungan dari berbagai kalangan. Dengan identitas yang kuat, PSI dapat mengurangi ketidaksetaraan akses dan meningkatkan solidaritas di antara kader.” (Wawancara Prof. Ramlan Surbakti, Jakarta 17 Mei 2024).*

Pernyataan tersebut menjadi kritik keras bagi PSI untuk lebih memperhatikan jenjang struktural terutama dalam proses kaderisasi, apalagi dalam pengangkatan Kaesang cenderung proses kaderisasi dan memperlihatkan pengambilan keputusan yang cenderung top-down dan elitistik. Akibatnya, partai kehilangan kesempatan membangun kepercayaan dari kader akar rumput serta kehilangan banyak kadernya. Penguatan kelembagaan semestinya

menjadi fondasi utama bagi partai yang ingin bertahan jangka panjang. Tanpa struktur internal yang kuat, partai menjadi rentan terhadap fragmentasi, terutama bila tokoh sentralnya kehilangan dukungan. Selain itu, lemahnya sistem kaderisasi juga mencerminkan buruknya perencanaan regenerasi politik.

Menjawab kritik utama dari kalangan akademisi terhadap <sup>91</sup> **pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang** berakibat ketimpangan akses politik dalam internal PSI, Andy Budiman, Wakil Ketua Umum PSI, menyatakan bahwa partainya merupakan ruang yang sangat terbuka bagi siapa pun, terutama anak-anak muda, untuk berpartisipasi secara aktif. PSI mengklaim telah memberi ruang yang luas bagi kader untuk berkembang berdasarkan kinerja dan dedikasi, bukan semata-mata relasi personal atau simbolisme politik.

*“Jadi kalau kesempatan itu kan dibuka selebar-lebarnya kepada semua pihak, semua anak muda untuk berpartisipasi. Jadi siapa yang punya kinerja yang terbaik pasti akan punya dapat kesempatan. Tapi sekali lagi di dalam politik itu ada kebutuhan partai untuk meraih dukungan masyarakat yang lebih luas, ada strategi elektoral. Nah dalam konteks itulah harus dilihat pengangkatan Mas Kaesang itu harus dilihat dalam konteks itu. Bagian dari strategi partai untuk meningkatkan dukungan masyarakat yang lebih luas.”* (Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024)

Pernyataan Andy Budiman mencerminkan upaya internal PSI dalam mengartikulasikan prinsip *open politics* yang selama ini menjadi identitas partai. Dengan menekankan keterbukaan kesempatan bagi semua anak muda, PSI mencoba mematahkan persepsi bahwa pengangkatan Kaesang semata-mata karena faktor dinasti politik atau akses istimewa. Andy menyiratkan bahwa PSI bukan hanya memberi ruang simbolik, tetapi juga ruang substantif bagi kader muda untuk berkiprah dan menunjukkan kapasitasnya. Hal ini menjadi penting dalam konteks demokrasi partisipatoris yang seharusnya mengedepankan kompetensi dan keterlibatan aktif, bukan sekadar jaringan atau nama besar.

Andy Budiman menyatakan langkah tersebut harus dilihat dalam kerangka strategi politik untuk memperluas dukungan elektoral PSI, terutama

dari generasi muda. Kaesang dinilai sebagai figur yang memiliki daya tarik simbolik dan koneksi emosional dengan masyarakat luas karena statusnya sebagai putra Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, Andy menegaskan bahwa pengangkatan Kaesang bukan sekadar langkah instan, melainkan bagian dari kalkulasi politik yang sah dalam sistem demokrasi.

Andy juga menekankan bahwa PSI adalah partai yang sejak awal mengusung semangat keterbukaan, terutama terhadap generasi muda. Ia menyatakan bahwa siapapun, termasuk anak-anak muda yang sebelumnya tidak dikenal dalam dunia politik, dapat berkembang di PSI selama mereka memiliki dedikasi dan integritas. Dengan demikian, kehadiran Kaesang tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penyingkiran kader lama, melainkan sebagai perluasan ruang partisipasi bagi anak muda Indonesia. Dalam pandangan ini, keterlibatan Kaesang justru menciptakan peluang baru untuk kaderisasi dan regenerasi politik dalam tubuh partai.

Lebih lanjut, Andy membandingkan PSI dengan partai lain yang menurutnya tidak memberikan ruang sebesar PSI bagi kader muda. Ia menyampaikan bahwa banyak kader muda PSI yang keluar dan bergabung ke partai lain tidak mendapatkan panggung dan kesempatan sebesar ketika mereka berada di PSI. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa PSI masih konsisten dengan karakter awalnya sebagai partai yang inklusif dan memberikan akses bagi mereka yang belum memiliki latar belakang politik kuat untuk tampil dan memimpin. Narasi ini digunakan untuk melawan asumsi bahwa pengangkatan Kaesang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar PSI.

*“Dan mungkin anak-anak muda PSI yang kemudian memutuskan keluar dari PSI, pindah ke partai lain, mungkin justru ruang mereka itu tidak sebesar ketika mereka berada di PSI.”* (Wawancara Andy Budiman, Jakarta 17 Desember 2024)

Dalam penjelasannya, Andy tidak menampik bahwa pengangkatan Kaesang mungkin menimbulkan pertanyaan di kalangan kader internal. Namun, ia kembali menegaskan bahwa partai harus adaptif terhadap dinamika politik yang berkembang, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan daya saing elektoral. Menurutnya, pragmatisme politik tidak berarti mengorbankan nilai-nilai partai, asalkan tetap ada ruang partisipatif dan sistem kaderisasi yang berjalan paralel. Pengangkatan Kaesang dilihat sebagai jembatan antara idealisme awal PSI dan kebutuhan elektoral yang makin kompleks.

Pernyataan ini dapat dimaknai sebagai bentuk kontra narasi terhadap tuduhan ketidaksetaraan akses yang dilontarkan para pengamat seperti Prof. Ramlan Surbakti maupun Ubedillah Badrun. Di tengah dinamika internal dan eksternal, PSI berusaha menegaskan bahwa struktur internalnya tetap menjunjung prinsip keterbukaan dan peluang yang setara, meskipun dalam praktiknya tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara strategi elektoral dan idealisme partai.

Meski demikian, narasi dari elite PSI ini tidak serta-merta menghapus kekhawatiran publik. Sebagian akademisi dan kader internal menyangkal bahwa peluang yang diklaim terbuka tersebut berlaku secara merata. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Ramlan Surbakti sebelumnya, potensi ketimpangan akses tetap ada dan perlu diantisipasi. Ketika partai lebih mengutamakan strategi elektoral dan dukungan tokoh populer, seperti Kaesang, ada risiko bahwa kader dengan rekam jejak perjuangan jangka panjang tersisih atau merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, meskipun peluang terbuka secara normatif, realitas politik seringkali menunjukkan adanya *strata akses* berdasarkan seberapa dekat seseorang dengan pusat kekuasaan partai.

#### 4.4.3. Implikasi Elektoral Terhadap Perolehan Suara PSI Pada Pemilu 2024

Jeirry Sumampouw menyatakan bahwa kehadiran Kaesang sebagai Ketua Umum PSI telah mengubah dinamika politik di Indonesia. Menurutnya, *“Kaesang, sebagai anak Presiden Jokowi, membawa serta modal politik yang signifikan, termasuk popularitas dan dukungan dari jaringan politik yang lebih luas. Partai-partai politik lain mulai memperhitungkan PSI sebagai kompetitor yang serius dalam pemilu. Sebelumnya, PSI mungkin dianggap sebelah mata, tetapi dengan Kaesang, mereka menjadi lebih diperhitungkan di berbagai daerah. Kehadiran Kaesang memaksa partai-partai lain untuk menyesuaikan strategi mereka. Mereka harus mempertimbangkan potensi suara yang mungkin diambil oleh PSI”* (Wawancara Jeirry Sumampouw, Jakarta, 27 Maret 2024).

Jeirry menambahkan bahwa daya tarik elektoral Kaesang paling kuat terasa terutama di kalangan pemilih muda yang tertarik dengan figur yang dianggap representatif terhadap generasi mereka. Dengan Kaesang di pucuk pimpinan, PSI tidak lagi dilihat sebagai partai kecil yang tidak berpengaruh. Partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar mulai melihat PSI sebagai pesaing yang patut diperhitungkan, terutama dalam memperebutkan suara anak muda dan kelas menengah urban. Selain itu, dukungan terhadap Kaesang tidak hanya datang dari Presiden Jokowi, tetapi juga dari jaringan bisnis serta aktor-aktor politik lainnya, yang memperkuat posisi PSI dalam lanskap politik nasional.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa keberadaan Kaesang tidak hanya memberikan pengaruh di internal PSI, tetapi juga mengguncang ekosistem kompetisi antarpolisi. Transformasi citra PSI dari partai kecil menjadi kekuatan politik yang potensial, didorong oleh efek ekor *jas (coattail effect)* dari popularitas Presiden Jokowi. Hal ini memunculkan ekspektasi baru dari publik dan tekanan dari kompetitor yang mulai melihat PSI sebagai ancaman elektoral yang patut diperhitungkan, terutama di kalangan pemilih muda dan perkotaan.

Data hasil pemilu menguatkan implikasi ini. Pada Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 2.650.361 suara, atau setara dengan 1,89% dari total suara sah nasional (KPU RI, 2019). Angka ini belum cukup untuk melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% yang disyaratkan untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2024, PSI mengalami peningkatan jumlah suara menjadi 4.260.169 suara atau sekitar 2,80% dari suara sah nasional (Tempo.co, 2024). Kenaikan ini menunjukkan lonjakan suara yang cukup signifikan secara kuantitatif—lebih dari 1,6 juta suara tambahan dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan suara ini tetap belum cukup untuk membawa PSI melampaui ambang batas parlemen. Artinya, meski terdapat peningkatan elektabilitas dan popularitas PSI di bawah kepemimpinan Kaesang, pencapaian tersebut belum mampu diterjemahkan secara maksimal menjadi kekuatan politik elektoral yang konkret. Dalam hal ini Prof. Ramlan Surbakti menegaskan bahwa Surbakti menegaskan bahwa tidak ada bukti empiris yang signifikan bahwa hubungan keluarga Kaesang dengan Presiden Jokowi mampu meningkatkan elektabilitas PSI secara substansial.

*“Tidak ada bukti empiris yang signifikan bahwa hubungan keluarga Kaesang dengan Presiden Jokowi mampu meningkatkan elektabilitas PSI. Popularitas Presiden Jokowi tidak otomatis tertranser kepada anggota keluarganya, terutama dalam konteks partai politik baru seperti PSI” (Wawancara Prof. Ramlan Surbakti, Jakarta 17 Mei 2024)*

Pandangan Prof. Ramlan menekankan bahwa dalam sistem demokrasi elektoral, dukungan politik berbasis kekerabatan tidak selalu cukup untuk membentuk basis elektoral yang kokoh. Elektabilitas harus dibangun melalui rekam jejak, program yang konkret, dan keterlibatan langsung dengan masyarakat pemilih, bukan sekadar pencitraan atau afiliasi keluarga. Dalam konteks PSI, meskipun figur Kaesang membawa visibilitas tinggi dan daya tarik bagi segmen anak muda, partai ini belum sepenuhnya mampu mengubah

visibilitas tersebut menjadi kepercayaan politik yang konsisten di tingkat akar rumput.

Hal ini terlihat dari disparitas antara ekspektasi publik yang tinggi terhadap PSI pasca pengangkatan Kaesang, dengan realitas suara yang diperoleh. Kenaikan sekitar 1,6 juta suara memang mencerminkan ada respons publik yang positif, namun belum cukup untuk menembus ambang batas parlemen. Ini menunjukkan bahwa popularitas belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas, terlebih dalam kontestasi politik yang sarat persaingan dan segmentasi pemilih yang kompleks.

<sup>92</sup> Di sisi lain, perolehan suara PSI yang masih di bawah 3% juga menandakan bahwa dukungan pemilih terhadap Kaesang belum sepenuhnya meluas secara nasional, dan masih terbatas di kalangan pemilih muda urban atau pemilih yang memiliki akses tinggi terhadap media digital. Ini menjadi tantangan strategis bagi PSI untuk memperluas jangkauan politiknya ke basis pemilih yang lebih beragam, serta membangun kepercayaan politik yang bersifat jangka panjang, bukan hanya berbasis figur sementara.

Pandangan kritis juga disampaikan oleh Ubedillah Badrun. Ia menyatakan bahwa keterkaitan PSI dengan Presiden Jokowi cenderung bersifat simbolik daripada substantif. Meski secara naratif PSI dianggap sebagai “partainya Jokowi”, faktanya suara PSI di Pemilu 2024 hanya sekitar 2,8%. Padahal, dukungan Jokowi terhadap pasangan Prabowo–Gibran (yang juga anaknya) berhasil menghantarkan mereka menjadi pemenang Pilpres dengan perolehan suara lebih dari 50%. Menurutnya, ini membuktikan bahwa pengaruh elektoral Jokowi tidak terdistribusi merata, apalagi secara otomatis ke PSI.

Ubedillah menyebut bahwa persepsi publik terhadap kekuatan PSI yang meningkat lebih banyak dipengaruhi oleh pencitraan dan framing media. Ia mengacu pada konsep *simulacrum* dari Baudrillard, yakni situasi di mana simbol atau citra menjadi lebih penting dari kenyataan itu sendiri. Dalam hal

ini, kedekatan Kaesang dengan Jokowi dibesar-besarkan sebagai kekuatan elektoral utama PSI, padahal secara faktual tidak berdampak signifikan pada perolehan suara. Ini menciptakan semacam realitas semu yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi elektoral sebenarnya.

*“Belum bisa dibuktikan jika merujuk pada PSI. PSI partainya Jokowi dan tegak lurus Jokowi, tapi kenapa Jokowi hanya 2% sedangkan Prabowo 50%, berarti Jokowi pengaruhnya kecil. Suara PSI adalah suara Jokowi 2%, yang membuat kesannya besar adalah adanya framing. Simulacrum, pencitraan.”. (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).*

Pencitraan semacam ini, lanjut Ubedillah, memang dapat memberikan efek jangka pendek berupa eksposur media yang tinggi dan peningkatan kesadaran publik terhadap partai. Namun dalam jangka panjang, jika tidak dibarengi dengan penguatan ideologis, kaderisasi, dan kehadiran nyata di akar rumput, maka elektabilitas tersebut akan stagnan atau bahkan menurun. Hal inilah yang, menurutnya, menjelaskan mengapa meskipun PSI mendapatkan perhatian besar sejak Kaesang memimpin, mereka tetap gagal menembus ambang batas parlemen.

Ubedillah menilai bahwa pendekatan yang bersandar pada pencitraan semata justru menimbulkan distorsi terhadap fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik masyarakat. Ketika PSI terlalu mengandalkan figur Kaesang dan afiliasinya dengan Jokowi tanpa diiringi oleh penguatan ideologis serta kaderisasi yang jelas, hal ini dikhawatirkan akan menciptakan partai yang bersifat elitis dan personalistik. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuatan partai seharusnya terletak pada platform kebijakan, partisipasi publik, serta konsistensi nilai-nilai yang diusung, bukan sekadar pada kekuatan simbol atau garis keturunan politik.

Dari sisi psikologi pemilih, fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemilih muda yang menjadi target utama PSI tidak sepenuhnya responsif terhadap simbol politik yang dibangun secara artifisial. Pemilih muda cenderung lebih kritis, dan ketika mereka melihat inkonsistensi antara citra

partai dengan realitas struktural maupun kinerja, maka potensi dukungan bisa melemah. Jika PSI terus menerus bertumpu pada pencitraan tanpa mengiringinya dengan kerja politik substantif, maka dalam jangka panjang partai ini berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kehilangan relevansi di tengah persaingan politik yang semakin dinamis dan kompleks.

Lebih jelas lagi, Ubedillah menjelaskan mengenai ketergantungan elektoral yang tinggi terhadap figur individu. Menurutnya, ketergantungan partai pada sosok tokoh populer seperti Kaesang adalah hal yang rawan secara politik. “Buruk, karena partai bergantung dengan tokoh. Jika tokoh hancur, partai akan hancur,” ungkapnya. Ketergantungan semacam ini menunjukkan lemahnya fondasi kelembagaan dan identitas ideologis PSI sebagai institusi politik.

Ubedillah juga menyoroti bagaimana narasi-narasi yang kontroversial dalam PSI kerap disapu bersih atau diredam oleh tokoh-tokoh internal seperti Ade Armando. Ia<sup>94</sup> menyebutkan bahwa tokoh ini memainkan peran penting dalam "menyapu" narasi yang dianggap negatif atau bertentangan dengan citra partai melalui cara-cara yang justru bertentangan dengan etika politik. “Memakai alibi demokrasi dengan hal yang bertentang etik,” katanya. Dalam pandangan Ubedillah, hal ini mencerminkan adanya upaya konstruksi wacana yang tidak sehat, yakni dengan membingkai (*framing*) isu-isu kontroversial menjadi sesuatu yang dianggap wajar atau bahkan progresif di mata publik. Strategi semacam ini mungkin efektif untuk mempertahankan dukungan dalam jangka pendek, namun tidak menjamin kredibilitas jangka panjang partai, khususnya di tengah pemilih yang semakin kritis terhadap pencitraan politik.

*“Buruk, karena partai bergantung dengan tokoh. Jika tokoh hancur, partai akan hancur. Adanya Ade Armando yang ‘menyapu’ narasi-narasi kontroversial, menggunakan alibi demokrasi untuk membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan etik. Ia mengonstruksi sesuatu yang nyelenah dengan membentuk framing tertentu, lalu memberikan gambaran yang seolah-olah lumrah di masyarakat.”* (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Kecenderungan PSI mengandalkan figur-figur publik yang kontroversial seperti Ade Armando juga menimbulkan dilema elektoral tersendiri. Di satu sisi, kehadiran tokoh semacam ini mampu menarik perhatian media dan memantik perdebatan di ruang publik. Namun di sisi lain, gaya komunikasi yang konfrontatif dan sering kali bersifat provokatif dapat menjauhkan sebagian pemilih rasional atau moderat yang justru mengharapkan wacana politik yang lebih substansial dan beretika. Strategi ini, meski efektif untuk menjaga segmentasi pemilih tertentu, berisiko menciptakan jarak dengan kelompok pemilih yang lebih luas, terutama mereka yang tidak menyukai pendekatan politik identitas atau politisasi isu-isu sensitif.

Prof. Ramlan Surbakti turut menambahkan alasan kegagalan PSI menembus parlemen bahwa tidak bisa memanfaatkan popularitas atau jaringan semata, harus ditopang oleh legitimasi politik dan kapasitas institusional partai. Dalam hal ini, Prof. Ramlan juga menekankan bahwa keberhasilan Kaesang dalam memanfaatkan modal politiknya harus diuji melalui keberlanjutan dukungan publik terhadap PSI, bukan hanya pada momentum elektoral semata.

*“Modal politik seperti popularitas, jejaring, dan dukungan dari tokoh penting memang penting. Tapi semua itu harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan partai. Kalau tidak ada kelembagaan yang kuat, maka modal politik itu bisa jadi semu. PSI harus memperkuat struktur organisasinya, memperjelas ideologinya, dan memberikan ruang bagi kader untuk berkembang secara merata. Jika tidak, dukungan terhadap Kaesang hanya akan bersifat sementara.”* (Wawancara Prof. Ramlan Surbakti, Jakarta 17 Mei 2024)

Pernyataan Prof. Ramlan Surbakti menyoroti pentingnya pelembagaan dalam partai politik sebagai penopang utama keberlanjutan elektoral. Modal politik yang dimiliki Kaesang, seperti popularitas, relasi kekuasaan, hingga akses terhadap jaringan elite politik nasional, memang mampu meningkatkan visibilitas PSI di mata publik. Namun, Prof. Ramlan mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari kelembagaan partai yang solid, semua modal politik tersebut hanya akan menjadi kekuatan semu yang tidak berakar. Dalam konteks ini, PSI dituntut untuk tidak hanya mengandalkan Kaesang sebagai simbol

elektoral, tetapi juga memperkuat struktur internal partai, memperjelas platform ideologi yang diusung, serta memberikan ruang kaderisasi yang adil dan terbuka bagi seluruh lapisan anggota partai.

Prof. Ramlan menegaskan bahwa masa depan PSI sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan institusionalisasi. PSI gagal membangun sistem rekrutmen politik yang transparan dan meritokratis, maka partai tersebut akan selalu bergantung pada tokoh karismatik yang menjabat sementara. Dukungan publik pun tidak akan bersifat permanen apabila tidak dibarengi dengan kerja politik yang konsisten di tingkat akar rumput. Dengan kata lain, figur Kaesang hanya dapat menjadi kekuatan elektoral yang berkelanjutan apabila PSI mengimbangnya dengan reformasi internal dan pelembagaan partai yang kuat serta progresif. Tanpa itu, elektabilitas PSI berisiko stagnan atau bahkan menurun pada pemilu mendatang.

Modal politik yang dimiliki Kaesang Pangarep, secara teori, memang terlihat kuat dan menjanjikan. Kaesang datang dengan sumber daya finansial yang besar, akses terhadap kalangan terdidik, serta jejaring sosial yang luas yang semuanya merupakan elemen penting dalam teori modal politik. Dengan latar belakang sebagai anak presiden, Kaesang juga memiliki modal simbolik yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh muda lain dalam perpolitikan Indonesia.

Namun, kenyataan politik tidak selalu selaras dengan konstruksi teori. Kenaikan suara PSI dari 1,89% pada Pemilu 2019 menjadi 2,80% pada Pemilu 2024 memang menunjukkan adanya peningkatan secara kuantitatif. Namun jika dibandingkan dengan ekspektasi besar yang ditumpukan pada Kaesang, peningkatan ini terbilang moderat. Artinya, modal politik yang dibawa Kaesang belum mampu menghasilkan lonjakan elektoral yang sebanding dengan sumber daya yang dimilikinya.

Ubedillah Badrun menilai bahwa salah satu penyebab lemahnya dampak modal politik Kaesang adalah sifatnya yang tidak organik. Modal

sosial yang dimiliki tidak terbangun melalui proses relasi jangka panjang, melainkan muncul secara instan karena posisi simbolik sebagai anak presiden. Tidak ada *bonding social capital* ikatan emosional dan ideologis yang mendalam antara pemimpin dan pendukungnya. Dalam pandangan Ubedillah, modal sosial seperti itu bersifat semu dan rapuh karena tidak didasarkan pada nilai, perjuangan bersama, atau keterlibatan yang otentik.

*“Secara teori, dengan modal tersebut ia akan hebat (dengan uang, orang terdidik (budaya) dan jaringan sosial yang luas). Tapi itu organik. Jika berkaca dengan suara yang didapatkan maka modal yang dimiliki Kaesang tidak signifikan atau mungkin memang tidak besar. Modal sosialnya semu karena tidak ada bonding. Segalanya standar, hanya modal finansial yang mendongkrak suaranya.”* (Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Selain itu, dominasi modal finansial dalam strategi PSI justru memperlihatkan ketimpangan dalam struktur partai. Ketergantungan pada uang dan figur sentral menjadikan partai rawan terhadap ketidakstabilan apabila figur tersebut kehilangan daya tarik publik. Ubedillah juga menyoroti bahwa peran modal budaya dan sosial cenderung minimal. Ini menunjukkan bahwa PSI belum berhasil membangun basis ideologis dan kultural yang kuat, dan masih sangat bergantung pada kekuatan instan yang rentan terhadap perubahan citra tokoh.

Di sisi lain, menurut Ubedillah Badrun, lonjakan sekitar 1,1% tersebut belum dapat dikategorikan sebagai dampak signifikan dari pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum. Ia menilai bahwa kontribusi utama terhadap peningkatan suara tersebut lebih berasal dari faktor finansial dan dukungan logistik, bukan dari kekuatan personal Kaesang sebagai figur politik. Hal ini mengindikasikan bahwa efek personalisasi kepemimpinan belum mampu menghasilkan perubahan elektoral yang substantif.

Lebih jauh, karakteristik pemilih PSI juga menunjukkan kecenderungan tertentu. Menurut Ubedillah, sekitar 60% basis pemilih PSI berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, seperti lulusan SMP.

Kelompok ini dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik yang lebih kompleks, sehingga lebih rentan terhadap politik pencitraan dibandingkan dengan politik gagasan. Dalam konteks ini, strategi PSI yang menitikberatkan pada daya tarik visual dan simbolik Kaesang memang mampu menjangkau segmen pemilih tersebut, namun belum berhasil menggerakkan dukungan dari basis pemilih yang lebih kritis dan berorientasi pada program.

*“PSI sudah punya modal electoral, dengan patron kaesang hanya berdampak 1,1% hanya karena uang bukan dari kaesang. 60% lulusan smp. Yang merasa puas dengan orang yang tidak unwell inform. Pengaruh Jokowi hanya cukup tapi tidak besar.”*(Wawancara Ubedillah Badrun, Jakarta 2 Maret 2024).

Meski PSI berhasil menambah jumlah suara secara absolut, lonjakan tersebut tidak cukup untuk menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. Kenaikan suara ini lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif, mengingat tidak disertai dengan perluasan basis ideologis atau transformasi citra partai secara substansial. Dalam banyak hal, peningkatan ini bisa dikaitkan dengan efek jangka pendek dari strategi komunikasi politik yang mengandalkan popularitas figur dan modal logistik, bukan hasil dari konsolidasi jangka panjang melalui kerja-kerja kaderisasi atau penanaman nilai partai ke masyarakat luas.

Pola kampanye yang digunakan PSI selama masa kepemimpinan Kaesang juga memperlihatkan pendekatan yang berfokus pada pencitraan visual dan branding personal. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk mengadopsi strategi politik berbasis media sosial dan narasi figur, namun minim dalam hal penetrasi isu-isu substantif yang mampu membentuk basis pemilih yang loyal dan rasional. Akibatnya, keterikatan antara pemilih dan partai menjadi longgar, dan potensi untuk mempertahankan atau meningkatkan suara di masa depan menjadi tidak stabil.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pengangkatan <sup>1</sup> Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan strategi politik yang sarat dengan kalkulasi elektoral. PSI memanfaatkan popularitas Kaesang sebagai putra Presiden Joko Widodo dan figur publik yang dikenal luas, khususnya di media sosial, untuk memperluas basis dukungan di kalangan pemilih muda. Strategi ini dilakukan dengan asumsi bahwa daya tarik personal Kaesang akan mampu mengangkat citra PSI sebagai partai modern dan progresif yang dekat dengan generasi milenial dan Gen Z.

Namun, strategi ini menimbulkan berbagai persoalan internal. Proses pengangkatan Kaesang dinilai mengabaikan mekanisme kaderisasi formal dan menggeser prinsip meritokrasi yang selama ini diklaim menjadi bagian dari identitas PSI. Ketidakterlibatan kader lama secara transparan memicu faksionalisasi dan ketegangan internal, memperlihatkan adanya jarak antara loyalitas historis dan strategi elektoral baru yang dibawa oleh kepemimpinan Kaesang. Hal ini menjadi tantangan serius dalam membangun konsolidasi organisasi secara berkelanjutan.

Dalam aspek modal politik, Kaesang memang memiliki keunggulan simbolik dan sosial, terutama karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Modal ini diperkuat oleh citranya sebagai pengusaha muda yang progresif, serta jejaring yang ia miliki di dunia digital dan bisnis. Namun, modal-modal tersebut belum cukup untuk mengangkat PSI menembus ambang batas parlemen. Hasil Pemilu 2024 yang hanya mencapai 2,80% menunjukkan <sup>90</sup> bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas.

Modal sosial Kaesang juga belum menunjukkan efek elektoral yang signifikan. Meskipun ia memiliki jutaan pengikut di media sosial, konversi dari popularitas digital ke dalam bentuk suara politik masih terbatas. Beberapa pengamat menyebut bahwa modal sosial Kaesang cenderung semu, karena tidak dibarengi dengan kedekatan emosional (*bonding*) dengan masyarakat akar rumput. Hal ini memperkuat anggapan bahwa popularitas digital tidak cukup tanpa koneksi yang substantif.

Modal ekonomi dan akses terhadap jaringan elite politik menjadi faktor penting dalam menopang pencalonan Kaesang. Keterlibatan aktor-aktor publik, serta kehadiran tokoh-tokoh terdidik yang mendukung PSI, menunjukkan bahwa strategi ini didukung oleh sumber daya yang kuat. Namun demikian, modal ekonomi saja tidak mampu menciptakan legitimasi politik tanpa dukungan ideologis dan partisipasi kader secara menyeluruh. Pencitraan yang dibangun seringkali bersifat sementara dan berisiko menurunkan kepercayaan publik apabila tidak diiringi konsistensi gagasan.

Modal budaya dan moral Kaesang masih menjadi titik lemah. Minimnya gagasan politik dan ketidakterlibatannya dalam wacana publik memperlihatkan keterbatasan personal dalam kapasitas politik. Ketergantungan terhadap figur Presiden Jokowi semakin memperkuat citra bahwa kepemimpinan Kaesang belum sepenuhnya berdiri sendiri. Hal ini berdampak terhadap persepsi publik terhadap PSI yang dianggap terlalu personalistik dan tidak berbasis kaderisasi.

Fenomena ini juga mencerminkan kecenderungan politik nasional yang semakin personalistik dan pragmatis. Strategi pengangkatan figur publik tanpa proses kaderisasi yang memadai mengindikasikan adanya krisis kelembagaan dalam partai-partai politik. Jika strategi semacam ini terus digunakan oleh partai lain, maka yang terancam adalah kualitas demokrasi jangka panjang,

terutama dalam hal pelemahan institusi politik, pengaburan ideologi, dan dominasi patronase kekuasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Kaesang memberikan dampak ganda. Di satu sisi, strategi ini berhasil meningkatkan visibilitas PSI di ruang publik. Namun di sisi lain, strategi ini membuka persoalan etik dan kelembagaan yang berpotensi menghambat konsolidasi jangka panjang. Temuan ini memberi kontribusi bagi kajian ilmu politik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika modal politik, strategi elektoral, serta tantangan personalisasi kekuasaan dalam konteks partai modern.

## **11** **5.2. Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

1. PSI perlu memperbaiki sistem kaderisasi yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis meritokrasi. Hal ini penting agar partai tidak terlalu bergantung pada figur publik semata, dan mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan yang sehat di internal partai.
2. Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum diharapkan lebih aktif menyampaikan gagasan dan strategi politik secara mandiri. Dengan meningkatkan kapasitas komunikasi dan kepemimpinan politiknya, ia dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
3. PSI harus membangun dan mempertahankan identitas politik yang konsisten, dengan memperjelas nilai-nilai dasar, visi partai, serta sikap terhadap isu-isu kebangsaan. Kejelasan ini akan membantu pemilih untuk memahami posisi PSI di tengah spektrum politik nasional.
4. Pemanfaatan media sosial harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat citra Kaesang, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik yang substantif. Konten

digital sebaiknya memuat informasi kebijakan, partisipasi politik, dan nilai-nilai yang relevan dengan generasi muda.

5. Penguatan struktur organisasi partai hingga tingkat lokal sangat penting dilakukan. PSI perlu memperluas dan memperkuat jaringannya, khususnya di daerah-daerah yang belum menjadi basis suara partai, agar dapat membangun dukungan elektoral yang lebih merata secara nasional.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

1. Studi ini membuka peluang untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang bagaimana modal politik baik simbolik, sosial, ekonomi, maupun budaya berperan dalam praktik politik dinasti di Indonesia yang demokratis namun masih paternalistik.
2. Penggunaan figur publik dalam kepemimpinan partai menuntut pengkajian ulang efektivitas personal branding dalam menentukan arah elektoral partai. Hal ini dapat memperkaya teori-teori komunikasi politik dalam era digital.
3. Partai-partai baru seperti PSI menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan partai mapan, terutama dalam aspek kelembagaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah bagaimana kelembagaan partai yang lemah memengaruhi strategi dan hasil politiknya.
4. Hubungan antara modal politik dan peningkatan elektabilitas partai masih membutuhkan pembuktian empiris yang lebih kuat. Studi selanjutnya dapat mengembangkan model analisis kuantitatif terhadap kontribusi tiap modal terhadap hasil suara partai.
5. Fenomena masuknya tokoh populer ke dalam partai menunjukkan adanya irisan antara politik, budaya populer, dan media sosial. Kajian interdisipliner yang menggabungkan ilmu politik, komunikasi, dan studi budaya dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami politik kontemporer di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Refisi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. (2014). *Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. in Knight, V. (ed.). SAGE Publications.
- Deny, S., dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislasi Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. New York: Oxford University Press.
- Masket, S. (2020). *Learning from Loss the Democrats 2016 – 2020*. Inggris: Cambridge University Press.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nimmo, D. (2006). *Komunikasi Politik: khalayak dan efek*. Bandung: Rosda.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute Democracy and welfarism.

Pamungkas, S. (2009). *Perihal Ilmu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Supranto. (2000). *Statistik (Teori dan Aplikasi) Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Tangkilisan, H. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Trichayono. (2005). *Reformasi Pemilu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

#### **Skripsi/Thesis/Disertasi**

Revananza, A. (2022). *Strategi PSI Jakarta Dalam Mendulang Suara Pada Pemilu 2019*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **Jurnal**

Apriyani, K. (2023). *Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali*. *JURNAL BAPPEDA LITBANG*, 2(1). Hal. 1 – 58.

Dewa, T., Sobari, W., dan Pohan, I. (2020). *Efek Jokowi atau Efek Kridayanti? Analisis Fenomena Efek Ekor Jas Terbalik Oleh Pesohor Politik*

- Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *Journal of Politics and Policy*, 3(1). Hal. 61 – 80.
- Fealy, G. (2014). Indonesia's Legislative Elections: The Importance of Money and Personalities. *AIIA Policy Commentary (Australian Institute of Internasional Affairs)*, 16. Hal: 41 – 47.
- Hidayat, M., dan Wardani, S., (2022). Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *Thejournalish: Social and Government*, 3(2). Hal. 75 – 87.
- Hutama, M., Solihah, R., dan Manan, F. (2021). Dilema Penggunaan Figur Sentral: Antara Idealisme dan Kebutuhan Suara Bagi Partai Solidaritas Indonesia. *Paradigma POLISTAAT*, 4(2). Hal. 112 – 120.
- Jones, P. E., Brewer, P. R., dan Young, D. G. (2016). The effects of traditional news, partisan talk, and political satire programs on perceptions of presidential candidate viability and electability. *Atlantic Journal of Communication*, 24(3). Hal: 172-184.
- Kussanti, D., Palupi, S., dan Bugov, D. (2023). Politainment Dalam Debut Awal Politik Kaesang Pangarep Terhadap Preferensi Warga Depok. *Jurnal Trias Politika*, 7(2). Hal. 340 – 358.
- Peacock, C., dkk. (2021). Choosing a Candidate: Traits, Issues, and Electability. *American Behavioral Scientist*, 65(3). Hal: 540 – 557.
- Rusman, Rafni, dan Suryanef. (2022). Modal Sosial Jokowi Dengan Politik Kekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta dan Medan. *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2). Hal. 106 – 113.
- Supit, M., dan Lopian, M. T. (2022). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(1).

Wibowo, A. (2018). Selektifitas Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Figur. *ETTISAL: Journal of Communication*, 3(2). Hal. 153 – 161.

Casey, K. (2008). Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory. *Paper Presented at The Illinois State University Conference for Student of Political Science*. Hal. 1 – 24.

#### **Website**

CNN Indonesia. (2023). Gurita Bisnis Milik Kaesang Yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230926092704-92-1003743/gurita-bisnis-milik-kaesang-yang-baru-diangkat-jadi-ketum-psi>. Diakses pada 5 Februari 2024.

CNBC Indonesia. (2024). PSI di Bawah Kaesang, Sanggupkah Melenggang ke Senayan?. <https://www.cnbciindonesia.com/research/20240109180240-128-504237/psi-di-bawah-kaesang-sanggupkah-melenggang-ke-senayan>. Diakses pada 5 februari 2024. s

Databoks. (2023). Kaesang Jadi Ketum PSI, Hal Baik atau Dinasti Politik? Ini Menurut Publik. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/20/kaesang-jadi-ketum-psi-hal-baik-atau-dinasti-politik-ini-menurut-publik>. Diakses pada 28 November 2023.

Firmansyah, T. (2023). Guru Besar UI: Kaesang Punya Modal Politik Besar untuk Maju Jadi Walikota Depok. <https://news.republika.co.id/berita/rvmcig377/guru-besar-ui-kaesang->

[punya-modal-politik-besar-untuk-maju-jadi-wali-kota-depok](#). Diakses pada 29 November 2023.

Handayani, S. (2019). Membidik Suara Milenial, Mendulang Suara Potensial. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7791/Pemilihan-Gubernur-dan-Wakil-Gubernur--Bupati-dan-Wakil-Bupati-serta-Wali-Kota-dan-Wakil-Walikota-adalah-penerapan-keaulatan-rakyat-ditingkat-provinsi-maupun-kabupaten-kota-yang-berlangsung-demokratis>. Diakses pada 28 November 2023.

KPU (Komisi Pemilihan Umum). (2023). RILIS. [https://www.kpu.go.id/dmdocument/1692355503Rilis%20KPU%20Tetapan%20DCS%20DPR%20&%20DPD\\_18%20Agustus.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocument/1692355503Rilis%20KPU%20Tetapan%20DCS%20DPR%20&%20DPD_18%20Agustus.pdf). Diakses pada 6 November 2023.

PSI.id. (2023). Tentang PSI. <https://psi.id/tentang-psi/>. Diakses pada 28 November 2023.

KPU (Komisi Pemilihan Umum). (2023). KPU RI Tetapkan Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih DPR-DPD 2019-2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7675/Usai-berakhirnya-sidang-PHPU-Legislatif-2019-di-MK--KPU-RI-langsung-merespon-dengan-menggelar-Rapat-Pleno-Penetapan-Terbuka-Penetapan-Kursi-dan-Calon-Terpilih-Anggota-DPR-dan-DPD-hasil-Pemilu-2019--Sabtu--31-8-2019>. Diakses pada 5 Juni 2025.

Antarnews.com. (2023). *Kaesang Pangarep resmi jadi Ketua Umum PSI*. <https://www.antarnews.com/berita/3743145/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi>

Asia News Network. (2023). *Jokowi's son Kaesang takes over PSI leadership days after joining the party*. <https://asianews.network/jokowis-son-kaesang-takes-over-psi-leadership-days-after-joining-the-party>

Kompas.com. (2025). *Kilas Balik: Kaesang 2 Hari Jadi Kader, Langsung Jabat Ketum PSI*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/15/14010161/kilas-balik-kaesang-2-hari-jadi-kader-langsung-jabat-ketum-psi>

Kompas.id. (2023). *Baru Dua Hari Anggota, Kaesang Langsung Jadi Ketum PSI*. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/09/25/en-baru-dua-hari-anggota-kaesang-langsung-jadi-ketum-psi>

Republika. (2023). *Dalih PSI Usai Dituding Langgar AD/ART soal Kaesang*. <https://news.republika.co.id/berita/s1mqgn436/ini-dalih-psi-usai-diduga-langgar-adart-soal-pengangkatan-kaesang-jadi-ketua-umum>

Kompas.com. (2023). *Infografik: Milenial Dominasi Pemilih Pemilu 2024 Capai 68,8 Juta*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282>

Koran Sulindo. (2023). *Pemilih Milenial Dominan pada Pemilu*. <https://koransulindo.com/pemilih-milenial-dominan-pada-pemilu-2024>

Tempo.co. (2024). *PSI Gagal Masuk Senayan, Ini Perolehan Suaranya*. <https://www.tempo.co/politik/psi-gagal-masuk-senayan-raihan-suara-partai-bro-dan-sis-dalam-pemilu-2019-dan-pemilu-2024>

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019*. Diakses dari <https://kpu.go.id>

# STRATEGI PENGANGKATAN KAESANG SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU 2024

ORIGINALITY REPORT

ARINA  
0/9-25 11.59

9%	9%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
3	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
5	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to LPPM Student Paper	<1%
10	repository.unifa.ac.id Internet Source	<1%
11	123dok.com Internet Source	<1%

12	<a href="http://ejournal.warunayama.org">ejournal.warunayama.org</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://jppol.ub.ac.id">jppol.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://wartakota.tribunnews.com">wartakota.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://eprints.itn.ac.id">eprints.itn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://monitorindonesia.com">monitorindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
23	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.journal.unrika.ac.id">www.journal.unrika.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[docplayer.info](http://docplayer.info)

26	Internet Source	<1 %
27	metrobali.com Internet Source	<1 %
28	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
29	adoc.pub Internet Source	<1 %
30	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
31	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.scribd.com Internet Source	<1 %
33	widyasari-press.com Internet Source	<1 %
34	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
35	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
36	koropak.co.id Internet Source	<1 %
37	qdoc.tips Internet Source	<1 %
38	timesindonesia.co.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
40	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

---

41 [neorespublica.uho.ac.id](http://neorespublica.uho.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

42 [unnisilvi.blogspot.com](http://unnisilvi.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

43 Syafi'ah, Nailis. "Evaluasi Program Vocational Life Skill Menggunakan Model Cipp (Context, Input, Process, Product) di Man 2 Banyumas", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)  
Publication

<1 %

---

44 Submitted to Universitas Andalas  
Student Paper

<1 %

---

45 [repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

46 [repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

47 Purnama, Adhika. "Gaya Komunikasi Politik Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Pada Akun @Pinterpolitik (Perspektif Teori Dramaturgi Erving Goffman)", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)  
Publication

<1 %

---

48 [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

49 [jurnal.sttrmk.ac.id](http://jurnal.sttrmk.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

50 [repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

51	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://www.radarlampung.co.id">www.radarlampung.co.id</a> Internet Source	<1 %
53	Budi Nuryanto. "FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021 Publication	<1 %
54	<a href="http://eprints2.undip.ac.id">eprints2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://ijcst.trunojoyo.ac.id">ijcst.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://kliksumut.com">kliksumut.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://m.tribunnews.com">m.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://repository.unmuhjember.ac.id">repository.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://vibdoc.com">vibdoc.com</a> Internet Source	<1 %
60	Nurul Mukharomah, Wulan Furrie Lenggana. "Strategi Komunikasi Politik Tim Sukses Pemenangan Pemilu Anies-Amin dalam Membangun Dukungan Publik melalui Twitter", Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2024 Publication	<1 %
61	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %

62	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="https://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="https://icelisting.com">icelisting.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="https://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="https://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="https://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="https://ddd.uab.cat">ddd.uab.cat</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="https://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="https://es.slideshare.net">es.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="https://jdih.kemdikbud.go.id">jdih.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="https://kc.umn.ac.id">kc.umn.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[lontar.ui.ac.id](https://lontar.ui.ac.id)

76	Internet Source	<1 %
77	<a href="https://m.id.ahantenna.com">m.id.ahantenna.com</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="https://minumkopi-id.blogspot.com">minumkopi-id.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="https://news.mediamuslim.org">news.mediamuslim.org</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="https://www.bakrie.ac.id">www.bakrie.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="https://www.detik.com">www.detik.com</a> Internet Source	<1 %
83	Tonny Dian Effendi. "Estimating the multilevel coattail effect during the 2019 Indonesian election", <i>Asian Affairs: An American Review</i> , 2022 Publication	<1 %
84	<a href="https://databoks.katadata.co.id">databoks.katadata.co.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="https://djbcpurwakarta.com">djbcpurwakarta.com</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="https://dwiefa.blogspot.com">dwiefa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="https://ejurnal.pps.ung.ac.id">ejurnal.pps.ung.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[eprints.walisongo.ac.id](https://eprints.walisongo.ac.id)

89	Internet Source	<1 %
90	<a href="http://hukumpemerintahan.wordpress.com">hukumpemerintahan.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://jateng.tribunnews.com">jateng.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="http://journal2.unusa.ac.id">journal2.unusa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://mhn.bphn.go.id">mhn.bphn.go.id</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://paradeshi.co.id">paradeshi.co.id</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
97	<a href="http://samarindakota.go.id">samarindakota.go.id</a> Internet Source	<1 %
98	<a href="http://shpashter.wordpress.com">shpashter.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://wealthbisnis.blogspot.com">wealthbisnis.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
100	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
101	<a href="http://www.detik60.com">www.detik60.com</a> Internet Source	<1 %
102	<a href="http://www.indonesiatravel.news">www.indonesiatravel.news</a> Internet Source	<1 %
103	<a href="http://www.katakini.com">www.katakini.com</a> Internet Source	<1 %

<1 %

---

104 [www.rctiplus.com](http://www.rctiplus.com)  
Internet Source

<1 %

---

105 Reninta Ananda, Tengku Rika Valentina.  
"Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi  
Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif  
Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat", JDKP  
Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik,  
2021  
Publication

<1 %

---

106 [en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org)  
Internet Source

<1 %

---

107 [www.bolasport.com](http://www.bolasport.com)  
Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On